



LAPORAN KINERJA

**BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2023**



**BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2024**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2023.

Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas publik pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2023 dan dapat dijadikan tolak ukur perbaikan kinerja pada tahun 2024 yang disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Jumlah sasaran strategis Perjanjian Kinerja tahun 2023 ini ada 4 (empat) yang teruraikan dalam 18

(delapan belas) Indikator Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra dan Rencana Kinerja yang telah ditentukan.

Hasil pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2023 adalah **107,99%** dalam predikat "**sangat baik**", lebih baik dari tahun sebelumnya 2022 yang mencapai 104,84%. Sedangkan serapan anggaran tahun 2023 adalah 99,32% lebih baik dari tahun sebelumnya 2022 yang mencapai 98,47%, kemudian untuk Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan pengukuran melalui aplikasi Kementerian Keuangan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memperoleh **96,37** (sangat baik) dan menempati peringkat **kedua** diantara 11 Unit Eselon I pada Kementerian Agama.

Perkenankan kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Menteri Agama RI atas arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penelitian pengembangan dan pendidikan pelatihan Kementerian Agama tahun 2023. Demikian pula kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Komisi VIII DPR RI dan Kementerian/Lembaga serta mitra kerja terkait atas dukungan dan kerjasamanya.

Kami berharap laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2023. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai amal usaha kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepala,



A. Suyitno



Daftar Isi

Halaman Judul.....	0
Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas dan Fungsi	6
C. Struktur Organisasi	6
D. Isu Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
E. Sumber Daya Manusia	10
F. Sistematika Laporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis.....	12
B. Perencanaan Anggaran	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	19
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	77
BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
Lampiran	88




Ikhtisar Eksekutif

Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2023, pagu awal adalah sebesar Rp633.634.057.000,- (*enam ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah*), kemudian berdasarkan Surat Menteri Agama Nomor B-237/MA/KU.00.1/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 hal Penyampaian Pagu Anggaran T.A. 2023 Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memperoleh pagu tahun 2023 sebesar Rp633.634.057.000,- (*enam ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah*). Pagu Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tersebut, pada tahun 2023 mengalami penyesuaian sebanyak dua kali yaitu: 1) Dalam rangka memenuhi anggaran untuk peningkatan kualitas dan kapasitas kehumasan dan komunikasi publik Kementerian Agama tahun 2023, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-0394/SJ/B.I.2.3/KU.00/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengalami penyesuaian semula sebesar Rp633.634.057.000,- (*enam ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah*) menjadi Rp631.934.057.000,- (*enam ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah*). Per tanggal 24 Mei 2023 Pagu Badan Litbang dan Diklat berkurang sebesar 0,27% atau Rp1.700.000.000,- (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*). 2) Selanjutnya Pagu Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengalami penyesuaian kembali dalam rangka *cost sharing* Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Agama Tahun 2023. Pagu Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, semula sebesar Rp631.934.057.000,- (*enam ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah*), per tanggal 27 Desember 2023 berkurang sebesar Rp1.500.003.000,- (*satu miliar lima ratus juta tiga ribu rupiah*) sehingga Pagu akhir Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi Rp630.434.054.000,- (*enam ratus tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh empat ribu rupiah*). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 unit kerja pusat (3 Puslitbang, 2 Pusediklat, dan Sekretariat Badan) dan 19 satuan kerja daerah (14 Balai Diklat Keagamaan, 3 Balai Litbang Agama, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan 2 Loka Diklat Keagamaan).

Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp626.118.996.972,- (*enam ratus dua puluh enam miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau 99,32%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.315.057.028,- (*empat miliar tiga ratus lima belas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah*), dikarenakan adanya sisa-sisa dari belanja pegawai, honor, transport, hotel perjalanan dinas, ATK, efisiensi, dsb. Realisasi anggaran tahun 2023 ini sedikit lebih besar dari tahun 2022 yang mencapai 98,47%. Berdasarkan pengukuran Kementerian Keuangan melalui aplikasi SMART, Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memperoleh **96,37 (sangat baik)** dan menempati peringkat **kedua** dari 11 Unit Eselon I di Kementerian Agama.

Sementara itu, dilihat dari capaian kinerja organisasi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat sampai akhir tahun 2023 sudah mencapai rerata realisasi kinerja organisasi sebesar **107,99%** pada predikat sangat baik, dan lebih baik dari tahun 2022 yang mencapai **104,84%**.



Beberapa kontribusi Badan Litbang dan Diklat tahun 2023 adalah menyelenggarakan Survey Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Indeks Karakter Siswa, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks Kepuasan Layanan KUA, Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya, *Religiosity Indeks*, Indeks Baca Tulis Al-Qur'an bagi SLTP dan SLTA, serta Indeks Literasi Moderasi Beragama bagi Dosen ASN pada PTKN. Untuk menunjang penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan telah dibangun aplikasi Simlitbang, e-Perpustakaan berbasis Android, Website, Journal, dan jejaring media sosial. Pelaksanaan Pelatihan dilakukan melalui media pelatihan reguler (tatap muka), e-DJJ (diklat Jarak Jauh), dan Pelatihan di Wilayah Kerja (PDWK) pada 14 Balai Diklat, 2 Loka Diklat dan 2 Pusdiklat yang sejak tahun 2020 telah dilakukan pada semua satuan kerja kediklatan. Tahun 2022 juga telah dikembangkan dan diimplementasikan diklat berbasis MOOC (*Massive Open Online Course*) pada Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Untuk area dukungan manajemen, fokus reformasi birokrasi dengan memperbaiki tata kelola kelembagaan khususnya penyetaraan jabatan, penyusunan peta proses bisnis dan perbaikan pengelolaan layanan publik. Pada tahun 2023 telah dilakukan penguatan satker yang akan diajukan projek pembangunan zona integritas dan WBK/WBBM yaitu: BDK Semarang (WBBM), LPMQ (WBK), BDK Denpasar (WBK), BDK Palembang (WBK), dan BDK Ambon (WBK).



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam RPJMN 2020-2024, Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan Visi Kementerian Agama dalam rencana strategis 2020 – 2024 adalah:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”


Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus. Makna Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 6 (enam) misi Kementerian Agama yaitu: (1). meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, (2). memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, (3). meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata, (4). meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, (5). meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, dan (6). memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama mempunyai fungsi strategis sebagai **supporting agency** dalam upaya mendukung kinerja pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama yaitu penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 menempatkan penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan.

Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi keagamaan yang memadai dalam rangka



terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas melalui kediklatan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 menjelaskan bahwa struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Susunan organisasi tersebut tergambar pada gambar 1:



Gambar 1.
Struktur Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan Badan Litbang dan Diklat didukung oleh 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 1 (satu) UPT Eselon II B yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sesuai PMA Nomor 68 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan 3 (tiga) UPT Balai Litbang Agama berdasarkan PMA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta 14 (belas belas) UPT Balai Diklat Keagamaan dan 2 (dua) Loka Diklat Keagamaan sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dan Pelatihan Keagamaan.




Gambar 2.
Struktur Organisasi UPT Badan Litbang dan Diklat

D. Isu Utama (*Strategic Issued*)

Isu utama yang menjadi permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Rumusan Kebijakan berdasarkan Hasil Survey

Kehadiran Badan Litbang dan Diklat menjadi penting dalam organisasi Kementerian Agama sebagai pendukung perumus kebijakan Kementerian Agama dan *supply* data dan bahan kebijakan yang berasal dari penelitian dan pengembangan.



Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa kedudukan penelitian sangat penting sebagai input dalam perumusan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan (baca: regulasi) bagi setiap perumus kebijakan dan pembentuk regulasi.

Pada tataran Kementerian Agama, hasil indikator kinerja Kementerian Agama sepenuhnya ada yang secara substantif menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal akan tetapi penyedia data indikator kinerja utama adalah Badan Litbang dan Diklat seperti indeks kesalehan sosial, indeks kerukunan umat beragama, indeks kepuasan layanan KUA, indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya, indeks karakter siswa dan persentase rumusan kebijakan yang berasal dari hasil survey.

Selain survey indeks, Badan Litbang dan Diklat juga melakukan penyediaan bahan rumusan kebijakan yang memiliki relevansi dengan bimbingan masyarakat agama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan. Semua hasil tersebut dirumuskan dalam *policy paper* atau bahan rumusan kebijakan.

Meskipun Litbang telah menghasilkan berbagai rumusan kebijakan berbasis hasil penelitian atau riset akan tetapi unit teknis atau *stakeholders* masih belum optimal untuk membuat kebijakan berdasarkan hasil riset tersebut. Hal mendasar terkait optimalisasi ini dapat dirumuskan kembali melalui mekanisme desain rumusan kebijakan yang melibatkan *stakeholders* mulai dari perencanaan, pelaksanaan survey, penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, evaluasi, publikasi dan pelaporan.

2. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Badan Litbang dan Diklat perlu diperkuat dan ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masing-masing unit dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Disamping tingkat internal, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu semakin diperkuat dengan para pengguna, yaitu para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi diharapkan akan terbangun kesepahaman internal lembaga Litbang dan Diklat dengan pengguna jasa layanan kelitbangan dan kediklatan.

Terbangunnya kesepahaman merupakan langkah penting untuk menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang sinkron atau *match* dengan kebutuhan pengguna. Langkah sinkronisasi ini menjadi penting karena sebuah jasa layanan hanya akan bernilai guna tinggi jika sesuai dengan kebutuhan *stakeholders*. Sejauh ini, meski dalam setiap tahun anggaran selalu dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pimpinan dan unit-unit teknis, tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya dirasakan lebih nyata. Badan Litbang dan Diklat perlu mengutamakan berbagai kegiatan survey penyiapan bahan kebijakan dan penguatan pengembangan SDM Kementerian Agama melalui Pelatihan yang dibutuhkan. Kegiatan ini dapat dikategorikan sebagai prioritas, karena sudah sesuai dengan kebutuhan pimpinan dan *stakeholders* sehingga berpeluang lebih besar untuk langsung dimanfaatkan dan dapat dikatakan pula sebagai kegiatan yang paling kontributif untuk mencapai sasaran program.

3. Belum Terbitnya Peraturan Menteri Agama yang mengatur SOTK Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terbitnya Perpres 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama, didalamnya mengatur perubahan Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, secara tugas dan fungsi masih menggunakan dasar PMA 72 Tahun 2022 dimana masih melekat tugas kelitbangan, padahal secara sumber daya manusia, sejak Januari tahun 2022 sejumlah peneliti sudah secara resmi dilantik dan dipindah ke BRIN. Sehingga hal ini menyebabkan beberapa indikator kinerja yang tertera pada Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama khususnya indikator kinerja kelitbangan tidak dapat tercapai/dipenuhi dikarenakan kebijakan tersebut. Sehingga percepatan terbitnya regulasi PMA yang mengatur perubahan nomenklatur dan SOTK Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat penting agar bisa dilakukan perubahan pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama dan Perjanjian Kinerja.

4. Pemenuhan Hak Pengembangan Kompetensi bagi setiap Pegawai ASN minimal 1 tahun 20JP

Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tentang pengembangan kompetensi setiap PNS. Pada Pasal 203 disebutkan bahwa setiap pegawai Pegawai Negeri Sipil memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi. Bahkan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit (minimum) 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun. Pengembangan kompetensi dimaksud diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan. Badan Litbang dan Diklat sebagai sebagai unit kerja yang berfungsi melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan mendapatkan tantangan untuk memenuhi Amanah regulasi tersebut, dengan mengembangkan konsep pelatihan berbasis MOOC (*Massive Open Online Course*) guna memperbanyak capaian sasaran pelatihan.

5. Terbitnya KMA Nomor 1179 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja

Dalam Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 1179 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja, dinyatakan bahwa penyesuaian sistem kerja dimaksudkan dan mempunyai tujuan untuk: a) mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien; b) memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi; c) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; d) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

6. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama

Mengamanatkan kepada Kementerian Agama sebagai Ketua Pelaksana Penguatan Moderasi Beragama untuk mengambil langkah-langkah teknis sebagaimana diatur dalam Perpres antara lain: a. Menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) atau regulasi lainnya yang relevan; b. Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada K/L; c. Melengkapi struktur Sekretariat Bersama Penguatan Moderasi Beragama

E. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Litbang dan Diklat didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah pegawai sebanyak 1.554 orang dengan rincian pegawai PNS sebanyak **1.138** orang dan non pns sebanyak **346** orang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Jumlah Pegawai Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Tahun 2023 per tanggal 12 Februari 2024

No	Satuan Kerja	Jumlah Pegawai (orang)			Total (orang)
		PNS	PPPK	Non PNS	
1	Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	218	19	71	308
2	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	75	9	4	88
3	Balai Litbang Agama Jakarta	19	3	9	31
4	Balai Litbang Agama Semarang	23	5	8	36
5	Balai Litbang Agama Makassar	33	3	11	47
6	Balai Diklat Keagamaan Provinsi Aceh	51	4	19	75
7	Balai Diklat Keagamaan Medan	59	2	18	80
8	Balai Diklat Keagamaan Padang	57	4	14	75
9	Balai Diklat Keagamaan Palembang	64	2	11	77
10	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	46	5	19	70
11	Balai Diklat Keagamaan Bandung	63	1	31	96
12	Balai Diklat Keagamaan Semarang	71	1	18	90
13	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	67	2	11	80
14	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	44	0	15	59
15	Balai Diklat Keagamaan Manado	49	0	17	66
16	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	60	1	4	66
17	Balai Diklat Keagamaan Makassar	52	4	21	77

18	Balai Diklat Keagamaan Ambon	39	1	19	59
19	Balai Diklat Keagamaan Papua	27	4	10	41
20	Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung	9	0	8	17
21	Loka Diklat Keagamaan Pekanbaru	8	0	8	16
TOTAL		1.134	70	346	1.550

F. Sistematika Laporan

Secara garis besar, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terdiri dari 4 Bab. Bagian awal memuat kata pengantar dan *Ikhtisar Eksekutif* yang merupakan gambaran sekilas tentang capaian program dalam kaitannya dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran program kelitbangan maupun kediklatan. Dikemukakan pula secara umum perencanaan strategis serta pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2023. Sedangkan paparan berikutnya dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi, juga sistematika laporan.

Bab II: Perencanaan Kinerja, menyajikan gambaran singkat tentang visi dan misi, kebijakan strategis, rencana strategis, indikator kinerja utama (IKU), rencana kinerja, dan penetapan/perjanjian kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2023.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat tahun 2023 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Litbang. Bab ini juga menyinggung secara sekilas tentang aspek keuangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Bab IV: Penutup, memuat simpulan serta saran dan solusi yang ditetapkan organisasi dalam rangka perbaikan kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dimasa yang akan datang.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan diberikan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
2. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2020 - 2024;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2020 – 2024 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan Diklat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1052 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Badan Litbang dan Diklat maupun *stakeholder* eksternal. Berdasarkan regulasi tersebut, penyusunan renstra tidak memuat visi, misi dan tujuan akan tetapi memuat sasaran strategis yang disesuaikan dengan sasaran strategis Kementerian Agama.

Secara ringkas substansi Renstra Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

1. Sasaran

Badan Litbang dan Diklat menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian
- b. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul
- c. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Diklat tahun 2023 adalah sesuai dengan bisnis utama Badan Litbang dan Diklat yaitu penelitian, kediklatan dan lajnah (pentashihan dan museum) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	87,00%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	87,00%
		Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	16
2.	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas, dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	44,00%
		Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	80.000
		Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	87,00%
		Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85,80
		Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	75%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85,60
		Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85,60



		Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	260.000
		Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	75.000
		Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	77,00
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	75,00%
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	84,00
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82,00
		Nilai Maturitas SPIP	3,10
		Indeks Profesionalitas ASN	78,00

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran terdiri dari 4 (empat) sasaran dan 18 (delapan belas) indikator kinerja. Berikut adalah perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat bersama Menteri Agama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	87,00%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	87,00%
		Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	16
2.	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas, dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	44,00%
		Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	80.000
		Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	87,00%
		Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85,80
		Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	75,00%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85,60
		Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85,60
		Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	260.000
		Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	75.000
		Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	77,00
		Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	75,00%
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	84,00
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82,00
		Nilai Maturitas SPIP	3,10
		Indeks Profesionalitas ASN	78,00

Nilai Kinerja Anggaran : 95

B. Perencanaan Anggaran

Sesuai surat Menteri Agama Nomor: B-237/MA/KU.00.1/08/2022 tanggal 1 Agustus 2022 hal Penyampaian Pagu Anggaran T.A. 2023 Kementerian Agama, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memperoleh pagu tahun 2023 sebesar Rp633.634.057.000,- (*enam ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Pagu Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tersebut, pada tahun 2023 mengalami penyesuaian sebanyak 2 kali yaitu:

1. Dalam rangka memenuhi anggaran untuk peningkatan kualitas dan kapasitas kehumasan dan komunikasi publik Kementerian Agama tahun 2023, berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-0394/SJ/B.1.2.3/KU.00/01/2023 tanggal 27 Januari 2023 anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengalami penyesuaian semula sebesar Rp633.634.057.000,- (*enam ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah*) menjadi Rp631.934.057.000,- (*enam ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah*). Per tanggal 24 Mei 2023 Pagu Badan Litbang dan Diklat berkurang sebesar Rp1.700.000.000,- (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) atau **0,27%**.
2. Selanjutnya Pagu Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengalami penyesuaian kembali dalam rangka *cost sharing* Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Agama Tahun 2023. Pagu Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, semula sebesar Rp631.934.057.000,- (*enam ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah*), per tanggal 27 Desember 2023 berkurang sebesar Rp1.500.003.000,- (*satu miliar lima ratus juta tiga ribu rupiah*) sehingga Pagu akhir Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi Rp630.434.054.000,- (*enam ratus tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh empat ribu rupiah*).

Berikut disampaikan rincian pagu alokasi anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2023 dan penyesuaiannya berdasarkan data per tanggal 22 Januari 2024:

Tabel 4
Penyesuaian Anggaran Tahun 2023

Alokasi Anggaran 2022 (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Pagu Akhir/Aktual (Rp)
633.634.057.000	-3.200.003.000	630.434.054.000



Tabel 5

Penyesuaian Pagu Alokasi Tahun 2023 Berdasarkan Unit/ Satuan Kerja

No	Unit/Satuan Kerja	Pagu Alokasi (Rp)	Anggaran per-22 Januari (Rp)	Selisih (Rp)
1	BDK Provinsi Aceh	22.608.468.000	23.954.113.000	1.345.645.000
2	BLA Semarang	15.270.363.000	14.570.328.000	-700.035.000
3	BLA Makassar	16.293.366.000	14.529.441.000	-1.763.925.000
4	BLA Jakarta	13.975.417.000	11.096.912.000	-2.878.505.000
5	BDK Medan	24.408.516.000	26.524.679.000	2.116.163.000
6	BDK Palembang	25.197.571.000	28.670.442.000	3.472.871.000
7	BDK Jakarta	24.326.602.000	25.241.024.000	914.422.000
8	BDK Surabaya	29.210.826.000	33.961.063.000	4.750.237.000
9	BDK Banjarmasin	22.484.699.000	22.154.163.000	-330.536.000
10	BDK Makassar	28.305.247.000	30.587.586.000	2.282.339.000
11	BDK Bandung	28.996.467.000	30.527.217.000	1.530.750.000
12	BDK Semarang	29.092.707.000	32.169.031.000	3.076.324.000
13	BDK Padang	23.184.802.000	25.157.352.000	1.972.550.000
14	BDK Papua	19.057.053.000	18.626.807.000	-430.246.000
15	BDK Manado	23.866.676.000	22.684.245.000	-1.182.431.000
16	BDK Denpasar	23.101.823.000	24.607.703.000	1.505.880.000
17	BDK Ambon	24.553.652.000	24.110.704.000	-442.948.000
18	Balitbangdiklat	187.788.074.000	171.217.296.000	-16.570.778.000
19	LDK Bandar Lampung	10.121.846.000	9.460.831.000	-661.015.000
20	LDK Pekanbaru	11.235.343.000	10.261.805.000	-973.538.000
21	LPMQ	30.554.539.000	30.321.312.000	-233.227.000
TOTAL		633.634.057.000	630.434.054.000	-3.200.003.000

Tabel 6

Alokasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	168.961.554.000	26,80
2	Belanja Barang	425.510.510.000	67,49
3	Belanja Modal	35.961.990.000	5,70
Total		630.434.054.000	100,00



Tabel 7

Alokasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Fungsi

No	Fungsi	Pagu (Rp)	%
1	Fungsi Agama	433.778.359.000	68,72
2	Fungsi Pendidikan	196.655.695.000	31,28
Total		630.434.054.000	100,00

Tabel 8

Alokasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Kegiatan

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	%
1	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	13.577.092.000	2,15
2	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	69.925.918.000	11,09
3	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	42.750.568.000	6,78
4	Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	20.713.264.000	3,29
5	Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	7.497.366.000	1,19
6	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	27.641.387.000	4,38
7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	279.314.151.000	44,31
8	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan	26.783.938.000	4,25



9	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	130.468.368.000	20,70
10	Penelitian dan Pengembangan Lektor dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	11.762.002.000	1,87
Total		630.434.054.000	100,00

Tabel 9
Alokasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Pagu (Rp)	%
1	Pusat	171.217.296.000	27,16
2	Daerah	459.216.758.000	72,84
Total		630.434.054.000	100,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam **Penetapan Kinerja** Badan Litbang dan Diklat tahun 2023 dengan **realisasinya**. Secara keseluruhan rerata capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2023 adalah 107,99% berada dalam predikat **sangat baik** yang merupakan rerata dari 18 (delapan belas) indikator kinerja. Nilai ini lebih baik dari tahun 2022 yang mencapai 104,84% dan tahun 2021 yang mencapai 103,35%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Balitbangdiklat meskipun terdapat kebijakan perpindahan SDM Peneliti ke BRIN namun tetap diatas 100% (sangat baik).

Tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2023 sebagaimana tabel 9 berikut:

Tabel 10
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	1	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	87,00%	100%	114,94%
		2	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	87,00%	100%	114,94%
		3	Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	16	32	120%
2	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang	1	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwenang	44,00%	57,21%	120%



No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	
	profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul		keagamaan yang moderat			
		2	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	80.000	279.684	120%
		3	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	87,00%	88,17%	101,34%
		4	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85,80	94,35	109,96%
		5	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	85,80	94,35	109,96%
3	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	1	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85,60	90,05	105,20%
		2	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85,60	86,50	101,05%
		3	Tingkat Viewer terhadap Layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama	260.000	673.451	120,00%
		4	Tingkat Pengunjung Museum Bayt Al-Qur'an	75.000	178.065	120,00%
		5	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	77,00	88,40	114,81%
4	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82,00	82,85	101,04%
		2	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	84,00	-	-
		3	Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,202	103,29%
		4	Indeks Profesionalitas ASN	78,00	78,00	100%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	
		5	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	75,00%	57,72%	76,96%
RERATA CAPAIAN					107,99%	

Keterangan:

- % Capaian maksimum 120%

A.1. Capaian Kinerja Sasaran Program I. Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian

Pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, indikator kinerja pada sasaran program ini dipresentasikan dalam 5 (lima) IKU, yakni IKU tentang Persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan; IKU tentang Persentase Manuskrip Keagamaan yang dimanfaatkan; IKU tentang Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian; IKU tentang Tingkat Sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat; dan IKU tentang Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023, tidak terdapat IKU tentang Persentase Manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan dan IKU tentang Tingkat Sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat, hal ini sebagai dampak dari kebijakan peleburan atau pengintegrasian lembaga penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (litbangjirap) ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sehingga fungsi litbangjirap yang ada pada Kementerian/ Lembaga sejak diterbitkannya Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah beralih menjadi kewenangan BRIN, termasuk pada Kementerian Agama yang sebelumnya fungsi tersebut dilaksanakan oleh Badan Litbang dan Diklat. Sehingga IKU pada sasaran ini menggambarkan capaian hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian yang dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* baik internal atau eksternal Kementerian Agama yang disasarkan dalam 3 (tiga) IKU sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11.

Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian (Area Kelitbangan) Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas hasil	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	87,00%	100%	114,94%

penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	87,00%	100%	114,94%
	Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	16	32	120,00%
Rerata Capaian				116,62%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area kelitbang adalah 116,62% berada pada area sangat baik”

IKU Persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan

Indikator pertama “*Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan*” berkaitan dengan hasil penelitian yang menjadi rumusan kebijakan (*policy paper*) dan dimanfaatkan dalam perumusan Berdasarkan target kinerja tahun 2023, jumlah penelitian yang ditargetkan untuk menjadi bahan kebijakan (*policy paper*) ada 68 penelitian/ pengembangan dan tercapai 99 bahan kebijakan (*policy paper*) atau 120%. Adapun target IKU adalah 87% sehingga capaian kinerja IKU ini adalah 114,94%.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja *persentase policy paper* yang dimanfaatkan tahun 2023 sudah tercapai bahkan melampaui target (111,11%), sebagaimana tabel berikut:


Tabel 12.
Capaian Indikator Persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan
Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	80%	82%	85%	87%	90%	sudah melampaui target Renstra 2024 (+10%)
Realisasi	100%	100%	100%	100%		
%	120,00	120,00	117,65	114,94	111,11	

Adapun ke 99 bahan kebijakan atau *policy paper* tersebut dapat dikelompokkan dalam rumpun bahan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan, bahan kebijakan rumpun kehidupan keagamaan, dan bahan kebijakan rumpun organisasi. Berikut adalah bahan kebijakan yang dihasilkan tersebut: yaitu:

Policy Paper Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan:

1. Menyelamatkan Lingkungan dengan Spirit Agama dan Kebijakan Keagamaan (IKS)
2. Revitalisasi KUA dan Evaluasi Kepuasan Masyarakat atas Layanan KUA
3. Memperkuat Moderasi Beragama Menuai Kerukunan Antarumat Beragama (KUB)
4. *Religiosity Index*


- 
5. Moderasi Beragama di Era Gen Z dan Milenial: Menjembatani Perbedaan untuk Keharmonisan
 6. Urgensi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Haji 2023 yang Inklusif bagi Jemaah Lansia
 7. Urgensitas Resolusi Konflik Sosial Dimensi Keagamaan di Indonesia (Penguatan Moderasi Beragama)
 8. Solusi Moderasi Beragama atas Isu-isu Kontemporer
 9. Memperkuat Ikhtiar Kemenag Mencipta Damai
 10. Mendorong Terobosan Program Moderasi Beragama
 11. Mengafirmasi Peran Pesantren Mentradisikan Moderasi
 12. Persepsi Publik Terhadap Tantangan Politisasi Agama Jelang Tahun Politik

Policy Paper Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

1. Perkuat Karakter Siswa Madrasah Aliyah dan Pendidikan Keagamaan Melalui Pengembangan Guru Sebagai Pendidik Karakter
2. Paper Penguatan Layanan Pendidikan Inklusif di Madrasah
3. Moderasi Beragama Berbasis Budaya di Madrasah
4. *Living Values* Moderasi Beragama Pada Pendidikan Jenjang Menengah: Strategi Implementasi Penguatan Moderasi Beragama pada Sekolah
5. Peningkatan Layanan Kehidupan Beragama Siswa Sebagai Upaya Mewujudkan Pendidikan Moderasi Beragama di Sekolah
6. Pendidikan Madrasah Ramah Anak
7. Kebijakan Pencegahan Kekejaran di Pesantren
8. Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Agama Islam Terpadu pada Jenjang Madrasah Ibtidaiyah
9. Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah
10. Pentingnya Panduan Layanan Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah
11. Pengukuran Keberhasilan Pembelajaran (literasi & Numerasi) pada Peserta Didik di Madrasah Tahun 2023
12. Respons Dini Konflik Keagamaan di Kalangan Pelajar
13. Urgensi revisi PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan

Policy Paper Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi:

1. IKU Menteri (Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya)
2. Verifikasi penerjemahan Al Quran kedalam bahasa daerah gayo dan tolaki
3. Penerjemahan/evaluasi/Pencetakan Kitab Agama lainnya
4. Penerjemahan Karya Moderasi Beragama Ke Bahasa Asing
5. Penyelenggaraan Konferensi Islage 4
6. Pencetakan Al-Quran Hasil Terjemahan Bahasa Daerah;
7. Digitalisasi Terjemah Al-Quran Bahasa Daerah
8. Evaluasi Indeks Layanan Kementerian Agama
9. Optimalisasi Kualitas Layanan
10. Pencetakan Komik Moderasi Beragama
11. Produksi Bahan Publikasi Program Legacy
12. Program Indeks Literasi Kitab Suci
13. Penyusunan Buku Saku Moderasi Beragama Bagi Generasi Z


- 
14. Sosialisasi Produk Perbukuan
 15. Pengawasan Buku Pendidikan Agama layak terbit Pada Sekolah dan Madrasah
 16. Orientasi Moderasi Beragama Bagi Penulis Buku Teks Utama Pendidikan Agama di Madrasah
 17. Layanan Pasca Penilaian Buku
 18. Penjajakan Penerjemahan Al-Quran ke Dalam Bahasa Daerah (NTT dan Papua)
 19. Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan
 20. Jurnal Lektur Vol. 1 dan 2
 21. Jurnal Heritage Vol. 1 dan 2
 22. Sosialisasi Moderasi Beragama Bagi Generasi Z
 23. Peningkatan dan Evaluasi Kualitas Produk
 24. Rapat Koordinasi/Evaluasi
 25. Pendampingan penerbit dan konsultasi perbaikan naskah buku hasil penilaian
 26. Evaluasi Kepuasan Masyarakat Layanan Perbukuan

Policy Paper Balai Litbang Agama Jakarta:

1. Revitalisasi KUA dengan judul Perbaiki Programnya atau Gagal dan Fokus pada Kualitas atau Kuantitas;
2. Harmonisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Riau;
3. Layanan Haji Lansia; dan
4. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial dalam Melestarikan Kerukunan Umat Beragama.
5. Literasi Digital Penyuluh Agama Indonesia Barat; dan
6. Profesionalisme Penyuluh Agama.
7. Penguatan Implementasi Kebijakan Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Penguatan Pemahaman Keagamaan Moderat Guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Negeri di Sumatera;
9. Efektifitas Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam Penguatan Moderasi Beragama di Banten dan Lampung;
10. Penelitian Moderasi Beragama bagi Guru dan Dosen yang disusun Bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Agama Badan Litbang dan Diklat; dan
11. *Indeks Programme for International Student Assessment (PISA)* atau program penilaian pelajar internasional yang juga disusun Bersama Pusat Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan Agama Badan Litbang dan Diklat
12. Pengukuran Potensi Kemandirian Pesantren; dan
13. Tasawuf Moderasi Beragama Aceh Singkil.

Policy Paper Balai Litbang Agama Semarang:

1. Pengukuran Indeks Revitalisasi Kantor Urusan Agama di Wilayah Kerja Balai Litbang Agama Semarang Kementerian Agama
2. Transmisi Pendidikan Kerukunan Umat Beragama Dalam Perspektif Ajaran Agama Kristen
3. Menakar Moderasi Beragama: Peran Strategis Penyuluh Sebagai Agen Moderasi Beragama Di Jawa Tengah
4. "Manajemen Mitigasi Layanan Haji Ramah Lansia" Balai Litbang Agama Semarang"

- 
5. Naskah Kebijakan Penguatan Harmoni Umat Beragama Menuju Tahun Politik 2024
 6. Moderasi Beragama Masyarakat Jawa Tengah Studi Pemahaman Dan Sikap Para Tokoh Panutan Terhadap Peran Agama Untuk Hidup Bersama Pada Masyarakat Plural
 7. Evaluasi Permenpan Rb Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan & Evaluasi ZI Menuju WBK Dan WBBM di Instansi Pemerintah
 8. Evaluasi Implementasi SPBE di Wilayah Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama Semarang
 9. Telaah Kritis Pembelajaran Al-Qur'an Metode Al-Baghdadi
 10. Inisiasi Madrasah dalam Mengatasi Perundungan di Lingkungan Pembelajaran, di Kota Pontianak
 11. Survei Persepsi Guru Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah Terhadap Sistem Kurikulum Merdeka di Provinsi Di Yogyakarta Tahun 2023
 12. Naskah Kebijakan Mitigasi Perceraian pada Guru Madrasah Melalui Penguatan Harmoni Keluarga dan Peningkatan Kinerja
 13. Penguatan Transformasi Balai Pengembangan Moderasi Beragama, Pendidikan, dan Literasi Keagamaan untuk Akselerasi Program Moderasi Beragama
 14. Penguatan Literasi Moderasi Beragama Guru Madrasah dan Guru PAI di Sekolah
 15. Penguatan Literasi Siswa Madrasah
 16. Survey Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat
 17. Strategi Penyelamatan Khazanah Manuskrip Karya Kh. Ahmad Rifa'i Dan Adaptasinya Terhadap Budaya Lokal
 18. Transformasi Digital Naskah Sebagai Upaya Konservasi Manuskrip Keagamaan Karya Ulama Nusantara
 19. Optimalisasi Kebijakan Dalam Penguatan Literasi Baca Tulis Al-Qur'an bagi Siswa SLTP dan SMA

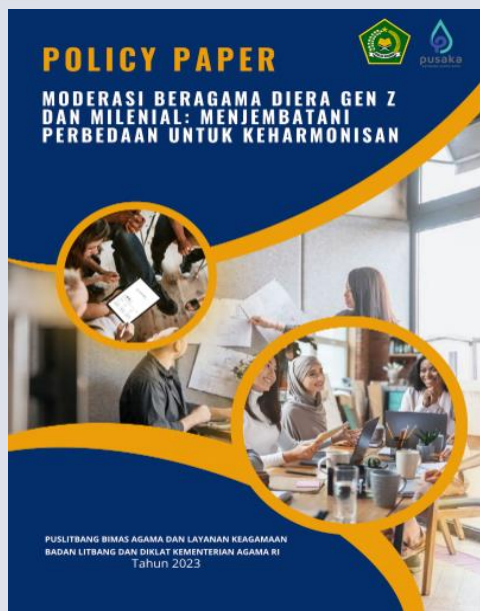
Policy Paper Balai Litbang Agama Makassar:

1. Evaluasi kebijakan terkait layanan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Program Revitalisasi KUA di Sulawesi Barat.
2. Pemetaan Potensi Keagamaan Melalui Religiousity Mapping.
3. Evaluasi kebijakan terkait layanan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Program Revitalisasi KUA di Sulawesi Selatan.
4. Penguatan Moderasi Melalui Festival Musik Moderasi Beragama Bagi Kalangan Generasi Z.
5. Asistensi Rumah Moderasi Beragama di IAIN Kendari
6. Asistensi Rumah Moderasi Beragama di UIN Datokoroma Palu
7. Efektivitas Pelatihan moderasi Beragama Bagi Asndi Lingkungan Kementerian Agama
8. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
9. Penguatan SDM ASN Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Menuju Smart ASN.
10. Advokasi Pengelolaan Moderasi Beragama di PTKN
11. Penguatan Sistem Tata Kelola Organisasi Satuan Kerja Kementerian Agama
12. Evaluasi dan Pengembangan Ekosistem Moderasi Beragama.
13. Asistensi Penyusunan Fiqhi Bunuh Diri.
14. Pemahaman Keagamaan Moderat di Kalangan Siswa Madrasah

15. Orientasi Moderasi Beragama.

Evidence pencapaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada link berikut:

<https://s.id/PolicyPaper2023>




“Policy paper disusun dari hasil ramuan berbagai penelitian yang memberikan rekomendasi kebijakan atas isu yang terjadi”. Policy paper akan menjadi dapur utama bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil”

Policy Paper Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)



dengan tahun 2023 tren Indeks KUB di Indonesia selalu mengalami kenaikan yang signifikan, bahkan pada tahun 2023 Indeks KUB di Indonesia merupakan pencapaian



tertinggi semenjak dilakukannya survey. Dalam arti, kinerja Kementerian Agama dalam menjaga kerukunan umat selama 3 (tiga) tahun terakhir boleh dikatakan sangat baik.

Survei KUB memiliki tujuan untuk mengukur tingkat KUB dengan mengacu pada 3 (tiga) dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Namun, selain tiga dimensi utama tersebut, informasi lain juga dikumpulkan untuk melihat data secara holistik. Dimensi Toleransi dimaknai dengan saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan. Dimensi kesetaraan bermakna setara dalam pengamalan ajaran agama. Sedangkan dimensi kerjasama berarti terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.


Metode yang digunakan dalam survei ini adalah Populasi survei KUB, dengan responden seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode *multistage random sampling*. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 13.600 orang. Dengan asumsi metode *simple random sampling*, ukuran sampel 13.600 responden memiliki toleransi kesalahan (*margin of error—MoE*) sekitar $\pm 2.9\%$ dan tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi pada batas bawah 400 responden, dengan dugaan MoE sampai dengan 5%.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (*spot check*). Selama pelaksanaan monitoring (*spot check*) keseluruhan proses wawancara dan penarikan sampel berjalan dengan semestinya, dengan kata lain ditemukan pelanggaran prosedural secara serius.

Policy paper (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap hasil Indeks KUB Kementerian Agama RI untuk periode 2023. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penetasan masalah kerukunan umat beragama. Adapun, secara ringkas temuan atas riset ini disajikan sebagai berikut:

1. Kondisi Faktual

Mengelola keberagaman di wilayah nusantara tidak cukup dilakukan dengan program simbolik yang sifatnya sporadis, diperlukan suatu tahapan dan komitmen yang berkelanjutan. Indonesia mungkin satu negara yang memiliki sistem kelembagaan dan perangkat sosial untuk memelihara relasi antar umat, antar entitas, dan antar etnis. Contohnya FKUB dan FPK, serta berbagai kelompok bauran yang sifatnya inisiatif partisipatif. Dengan kekayaan sosial budaya antara suku bangsa, etnis, bahasa, agama dan kepercayaan mengandung potensi konflik dan sisi lainnya juga harmoni secara bersamaan, hal tersebut perlu dikelola sebagai tanggungjawab bersama. Dari sekian keberagaman, ditengarai relasi antar umatlah yang paling rentan bergejolak sewaktu-waktu, jika tidak selalu direkatkan kembali dalam suatu sistem berkelanjutan. Harmoni sosial dan keselarasan hidup umat beragama adalah bagian penting dalam pembangunan manusia, hendaknya harmoni tersebut berintegrasi dengan nilai-nilai kemanusiaan sampai tercipta Indonesia yang maju dan beradab.




Kondisi faktual KUB diuraikan dalam dua hal yakni: (i) status sosial-keagamaan di Indonesia. Aspek ini melihat relasi jumlah pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan sikap toleransi di Indonesia. Bagian ini juga dielaborasi dengan sajian data laporan penelitian-penelitian; (ii) Status KUB pada Program Kementerian Agama. pada aspek ini diuraikan mengenai program-program terkait KUB dalam Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024.

2. Analisis Masalah dan Potensi

Indeks KUB pada tahun 2023 secara tajam meningkat sampai dengan 76,05 dengan kategori “tinggi”. Jika mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024, target Indeks KUB tahun ini adalah 74, belum mencapai angka optimis seperti yang diinginkan, bertahap melalui intervensi program sampai dengan tahun 2024, melampaui angka optimis 75,80. Adapun dimensi Indeks KUB tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- (1) Toleransi: Toleransi adalah dimensi dasar dari kerukunan, suatu hal yang harus terus dipelihara dan menjadi tolok ukur penting untuk memahami kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Media memberikan perspektif lain terhadap keberagaman, relasi antarumat kerap disodorkan warta penolakan kelompok pemeluk agama terhadap pembangunan tempat ibadah agama lainnya. Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu indikator Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda (72,75) dengan korelasi 0,832 dan Penganut agama lain membangun rumah ibadah di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat (71,60), sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan.
- (2) Kesetaraan: Terkait dimensi kesetaraan, sebagai konfirmasi dari temuan sebelumnya, pada tahun 2021 disebutkan 35% masyarakat Indonesia tidak setuju bila orang beda agama dengan dirinya menjadi pimpinan di daerahnya. Lalu 23% masyarakat beragama Indonesia tidak setuju semua agama diberikan hak yang sama dalam menyiarkan agamanya. Tentunya angka tersebut merupakan pekerjaan penting bagi pemerintah untuk menyebarkan gagasan kesetaraan tentang hak beragama lebih intensif lagi. Meskipun begitu, secara umum Indonesia harus menatap optimis terhadap keberlangsungan kehidupan keagamaan yang adil dan seimbang. Berikut data mengenai dimensi kesetaraan yang variasi skornya cukup baik, dengan kata lain cukup tinggi. Secara umum, Dimensi Kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 77,62 yang berarti sudah baik. Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu indikator Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak presiden Republik Indonesia 71,23, dengan korelasi 0,755. Kemudian perhatian pada indikator Setiap Warga Negara Memiliki Hak Mendapatkan Pekerjaan yang Layak, Apapun Agamanya, korelasi sebesar 0,750, dan memiliki skor 82,27. Sebagai dua indikator yang dominan pengaruhnya, maka kedua indikator yang dapat dijadikan prioritas dalam hal menyusun program.

- 
- (3) Kerjasama: Dimensi kerjasama seringkali menimbulkan pertanyaan, apakah dimensi tersebut merupakan puncak dari kerukunan? Atau ketiga dimensi menunjang kerukunan secara bersama. Perspektif Kerjasama pada bahasan ini adalah sikap masyarakat untuk melakukan kegiatan bersama dengan penganut agama lain dalam berbagai konteks. Secara umum, dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 76. Prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari dimensi yang memiliki rerata faktor *loading* yang paling besar, yaitu indikator Jual beli atau Bertransaksi dengan penganut agama lain, memiliki skor indeks 72,07 dengan nilai korelasi 0,782. Kemudian indikator Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama, dengan korelasi sebesar 0,766 skor indeks 76,94. Indikator yang memiliki skor tinggi adalah Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain dengan skor 80,71.

Survei KUB ini turut menguraikan indikator lain dalam hal ini ialah Faktor Sosiologis, yang dianggap mempengaruhi kerukunan warga negara Indonesia, pada tahun 2023 melihat pada daya ungkit beberapa faktor terhadap kerukunan umat beragama pada keseluruhan dimensi. Bauran Agama dengan Indeks Kerukunan Umat Beragama memiliki nilai korelasi yang berada pada angka 0,694 dengan kategori TINGGI. Artinya, semakin berpengalaman seseorang berinteraksi dengan umat yang beragama lain maka akan semakin tinggi pula tingkat kerukunan yang dia miliki. Pengalaman diskriminasi terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai korelasi yang berada pada angka -0,233 dengan kategori lemah. dapat dipahami semakin tinggi tingkat pengalaman seseorang mengalami diskriminasi ibadah dan social, maka akan semakin rendah tingkat kerukunan yang dia miliki. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara pengalaman seseorang mengalami/terlibat kasus politisasi agama terhadap Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai korelasi -0,519. Dengan kata lain, seseorang yang mengalami/terlibat kasus politisasi agama maka akan cenderung semakin rendah tingkat kerukunan yang dia miliki.

Terdapat hubungan negative juga (signifikan) antara kecenderungan seseorang memilih pemimpin dengan Variabel Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan nilai korelasi yang berada pada angka -0,451. Artinya, semakin setuju seseorang dengan preferensi agama, ketokohan dalam memilih pemimpin (politik identitas) maka akan semakin rendah tingkat kerukunan yang dia miliki. faktor-faktor tersebut dianggap memiliki unsur civic engagement, cukup memberikan pengaruh terhadap relasi yang diciptakan pada lingkungan. Selanjutnya kesalehan ritual masyarakat Indonesia yang dianggap mempengaruhi keadaan sosiologis masyarakat dalam mempengaruhi kerukunan mendapatkan nilai korelasi signifikan pada 0.315.

3. Rekomendasi Kebijakan

Aktor/*stakeholder* yang melakukan program: FKUB, Ormas Keagamaan, Pemuda (*Millenial Group*) lintas agama, Kelompok Budaya Lintas Agama, Penyuluh Agama Lintas Agama, Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan pada Seluruh Provinsi, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama. *Stakeholders* terkait juga diharapkan dapat melaksanakan program prioritas dalam penelitian ini yaitu penguatan program moderasi beragama kolaborasi berbagai instansi pemerintah dan menajamkan visi moderasi beragama secara nasional terhadap berbagai program kementerian terkait.



Adapun Rekomendasi yang ditawarkan dari alternatif bagi *stakeholder* terkait untuk menyelesaikan masalah kerukunan di Indonesia, yaitu:

- a. Mendorong sinergi antarlembaga kerukunan sampai pada tingkat kecamatan, baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun yang bersifat partisipatif.
- b. Dimensi toleransi seringkali menjadi perhatian karena inti dari kerukunan adalah hal tersebut, pemerintah provinsi perlu melibatkan seluruh potensi kabupaten dan kota, dan melibatkan unit sosial di masyarakat masyarakat sampai pada tingkatan keluarga.
- c. Pentingnya inisiasi program kolaboratif antarlembaga dan antar pemerintah daerah terutama yang belum memiliki program kerjasama antarumat beragama
- d. Dengan meningkatnya angka indeks kerukunan antarumat beragama secara nasional, seiring dengan gencarnya program moderasi beragama selama dua tahun terakhir, maka pola pengembangan giat moderasi dapat terus dijalankan oleh lembaga yang memiliki perhatian terhadap kerukunan.
- e. Mendorong dengan berbagai model untuk meningkatkan *Trust*, *Civic Engagement*, dan kontak agama melalui kegiatan forum dialog, kerjasama social antar umat beragama, (misalnya: menjaga keamanan lingkungan, membangun kepercayaan bersama)
- f. Penyuluh agama perlu meningkatkan kesalehan ritual masyarakat melalui kegiatan ceramah keagamaan dan pendampingan ritual keagamaan
- g. Menggencarkan moderasi beragama melalui kepenyuluhan, tidak hanya penyuluh kementerian agama tetapi dapat disinergikan dengan berbagai elemen pemerintahan.
- h. Mempertimbangkan kurikulum Pendidikan Agama yang ramah terhadap konsep toleransi antarumat dan anteraliran internal agama. Perlunya menjadikan toleransi sebagai prioritas ke dalam sistim pendidikan dan advokasi ke seluruh lembaga Pendidikan dalam hal membangun karakter anak bangsa di masa depan.
- i. Perlunya dimunculkan tentang pendidikan multikultural, tidak hanya pada aspek kognisi namun perlu dibangun kontak antarpelajar dan mahasiswa antarpemeluk agama berbeda.
- j. Memperkuat kapasitas ruang publik diberbagai tempat di kota, tidak hanya dengan penyuluhan (public education) juga dengan memperbanyak taman kota yang inklusif, perpustakaan, tempat bermain, ruang interaksi terbuka.
- k. Perbaikan regulasi terhadap pemukiman yang eksklusif seagama, banyaknya promosi perumahan menawarkan tendensi kenyamanan dengan hidup bermasyarakat seagama perlu dikurangi.

Policy Paper Indeks Kesalehan Sosial

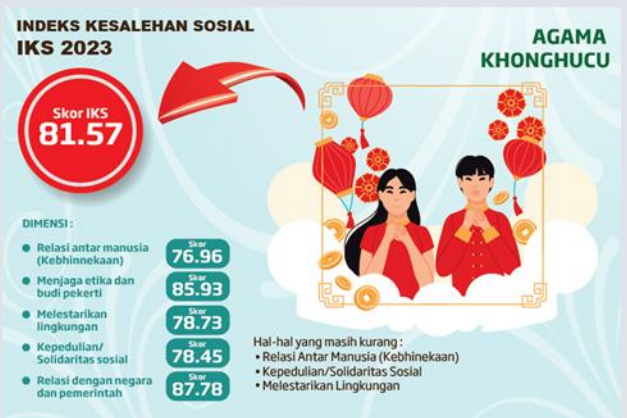
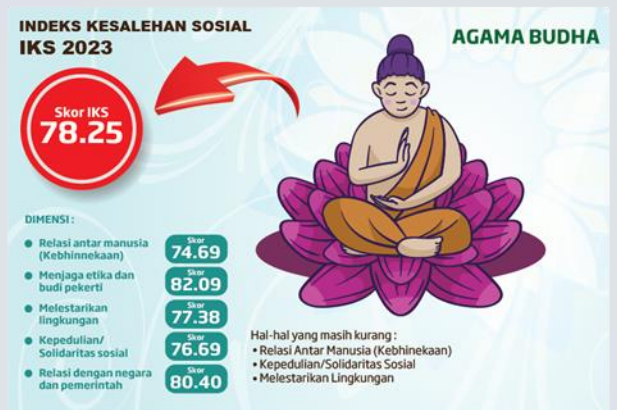
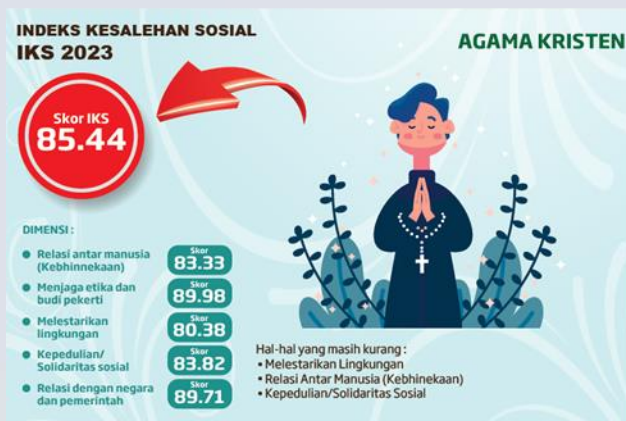
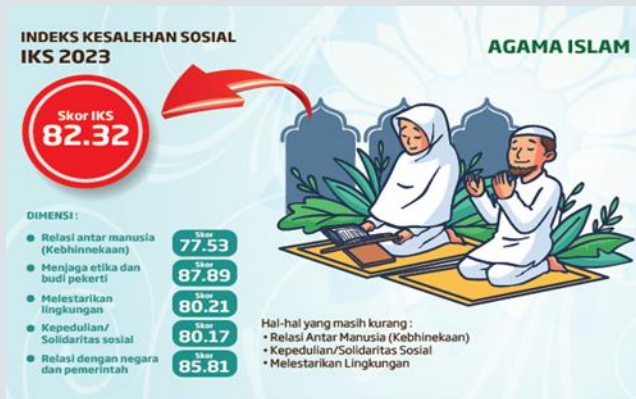
“Indeks Kesalehan Sosial (IKS) di Indonesia tahun 2023 menunjukkan angka yang tinggi yaitu 82,59, dengan rentang 0 sampai 100”



Indeks Kesalehan Sosial merupakan bagian dari upaya untuk mengukur kualitas *personal poety* dan *social poety* untuk mendukung terwujudnya negara yang sejahtera, adil dan Makmur. Sebab, Indonesia adalah bangsa yang tidak dapat melepaskan berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keagamaan, maka dari itu kesalehan sosial merupakan bagian penting dari relasi agama dan negara. Kesalehan sosial (dalam terminologi yang dibangun untuk kepentingan penelitian) didefinisikan sebagai sikap dan tindakan pemeluk agama yang mencerminkan kepedulian sosial, etika dan budi pekerti, relasi antar manusia, kepedulian lingkungan, kepatuhan pada aturan masyarakat, negara dan pemerintah.

Pada tahun 2023 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, telah melaksanakan penelitian mengenai indeks kesalehan sosial. Penelitian ini berbasis metode survei pada beberapa kota yang dominan pemeluk 6 agama. Responden riset diperoleh menggunakan teknik *clustered random sampling* pada 20 Kabupaten dan kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan rancangan populasi riset adalah pemeluk enam agama yang cukup signifikan secara jumlah di beberapa kota Indonesia. Jumlah responden 1.600 yang diwawancarai langsung atau mengisi jawaban pada kuesioner. Dilakukan oleh 20 koordinator penelitian, 80 surveyor, dan 3 *spot checker*. Analisis data menggunakan tabulasi silang dan SEM. Tingkat kepercayaan 95 %, dan *Margin of Error* 2.1 %. Data lainnya diperoleh melalui metode *Focus Group Discussion* (FGD) di beberapa kota yang menggambarkan spirit keberagaman masing-masing 6 agama. Penelitian ini dilaksanakan dalam masa perencanaan teknis sampai dengan penyajian data pada April s.d Juni 2023.

Indeks kesalehan sosial pada tahun 2023 adalah sebesar 82,59 pada skala 0 – 100, rentang angka kesalehan yang mendekati nilai 100, yang berarti sangat tinggi, namun menurun dibanding dengan tahun 2022. Nilai masing-masing indeks per dimensi adalah Kepedulian Sosial, 80,41; Relasi Antarmanusia (Kebinnekaan), 78,19; Etika dan Budi pekerti. 88,02; Melestarikan Lingkungan, 80,28; Kepatuhan pada Negara dan Pemerintah, 86,06. Nilai indeks kesalehan sosial tahun 2023 pada masing-masing agama dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3

Infografis Indeks Kesalehan Sosial Tahun 2023 pada masing-masing Agama

Temuan lainnya yang diuraikan dalam survey ini ialah terkait dengan faktor pengaruh terhadap kesalehan agama, paling signifikan adalah kesalehan ritual (saleh individual), habituasi atau pembiasaan di lingkungan rumah, pengetahuan tentang kesalehan sosial, kemudian program dan kegiatan Kementerian Agama. Nilai atau skor masing-masing faktor

pengaruh sebagai berikut: (1) Kesalehan ritual, memiliki skor 83,9 dengan determinasi 0,576; (2) Habituasi, dengan determinasi 0,530; (3) Pengetahuan, memiliki determinasi 0,035, tidak signifikan terhadap kesalehan sosial; 4) terpaan kinerja Kementerian Agama signifikan, memiliki determinasi 0,219, dengan skor 50,50. Skor terpaan Kementerian Agama signifikan namun lebih rendah dibanding indeks 2022. Prinsipnya, penelitian ini juga menguraikan bahwa spirit keagamaan dan narasi keagamaan mulai tampak berpihak pada pelestarian lingkungan di beberapa tempat, dilakukan atas kolaborasi rohaniawan dan para penyuluh lintas agama.

Adapun Rekomendasi Kebijakan yang ditawarkan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Menteri Agama perlu menggalakkan program moderasi beragama dengan menurunnya indeks relasi kebhinnekaan, terutama sebab indikator apresiasi terhadap adat dan budaya yang rendah di kalangan pemeluk agama.
- b. Menteri Agama tetap harus menguatkan kembali indikator kesalehan sosial sebagai IKU harus ditunjang oleh program yang terukur berjenjang terhadap semua unit kerja di Kementerian Agama;
- c. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, memastikan Indeks Kesalehan (Sosial) Umat Beragama terakomodasi ke dalam perencanaan rutin dan menjadi skala prioritas pembangunan manusia;
- d. Naskah pengukuran melalui Indeks Kesalehan pada masing-masing direktorat secara rinci selaras dengan dimensi kepedulian sosial (*caring, giving*), relasi antarmanusia (kebinnekaan), etika dan budi pekerti, melestarikan lingkungan, dan kepatuhan kepada negara dan pemerintah.
- e. Bagi seluruh penyuluh agama di lingkungan Kemeterian Agama, dapat memprioritaskan materi kesalahan sosial terutama lima dimensi yang ada, terpenting adalah menajamkan kegiatan kepedulian pada lingkungan alam dan kerentanan sosial di sekitar.

POLICY PAPER SURVEY INDEKS KEPUASAN KUA DAN EVALUASI KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAYANAN KUA



Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada tahun 2021 telah mencanangkan program Revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk meningkatkan layanan keagamaan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup umat beragama.

Program revitalisasi Menteri Agama secara umum terdiri dari beberapa sasaran, yaitu: (a) peningkatan kapasitas kelembagaan; (b) penyempurnaan standar layanan; (c) transformasi digital; (d) penguatan SDM; (e) penguatan regulasi; dan (f) penguatan dan integrasi data.

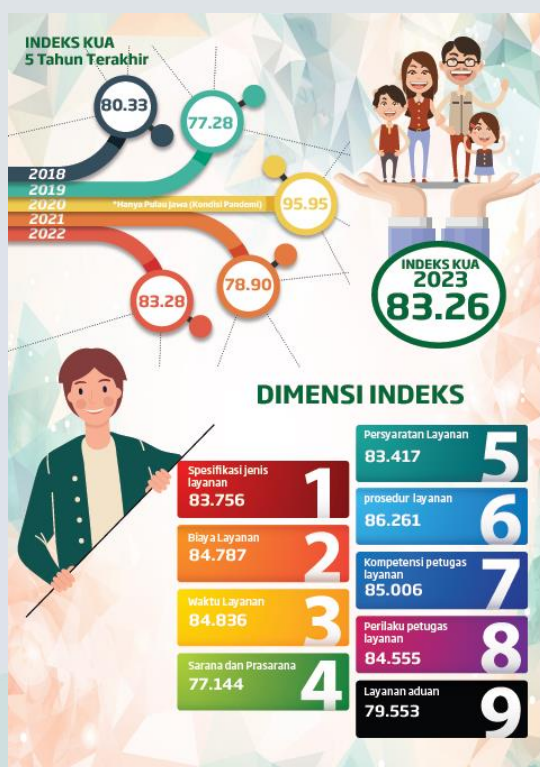
Menteri Agama, menetapkan 6 KUA yang menjadi *piloting*, kemudian ditambah lagi 100 KUA sebagai pelaksana revitalisasi KUA pada tahun 2021, pada tahun 2022 revitalisasi dilakukan pada 400 KUA. Selanjutnya, sebagaimana tertuang

dalam SK Dirjen Bimas Islam No. 84 tahun 2023 tentang Penetapan Revitalisasi KUA pada tahun 2023, program Revitalisasi KUA tersebut akan dilakukan penambahan di 500 KUA.

Pada tahun 2023 telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA, dengan temuan hasil survey: (a) rerata skor nasional indek kepuasan masyarakat atas layanan KUA sebesar 83,26 (kategoiri sangat tinggi); (b) tingkat kepuasan masyarakat atas layanan KUA yang mrlaksanakan program revitalisasi dan yang belum melaksanakan revitalisasi signifikan tidak berbeda (sama); serta (c) layanan KUA pada daerah mayoritas muslim dan daerah minoritas muslim sifnifikan tidak berbeda (sama).

Hasil riset menyimpulkan bahwa, kepuasan masyarakat atas layanan KUA sangat tinggi (>80,00); program revitalisasi KUA berhasil dengan adanya perbedaan signifikan dengan KUA yang belum Revitalisasi, dan Layanan KUA di daerah Mayoritas muslim dan minoritas muslim sama-sama baik, artinya tata Kelola KUA telah berjalan sesuai harapan. Namun demikian, harus diakui terdapat dimensi yang masih perlu peningkatan yaitu sarana dan prasarana dan layanan aduan.

Program Revitalsasi Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan layanan keagamaan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Pada sisinya yang lain, survei ini bertujuan antara lain yaitu, *pertama*, mengukur indeks rata-rata nasional kepuasan masyarakat atas layanan KUA. *Kedua*, mengetahui perbandingan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA yang telah melaksanakan Revitalisasi dan belum melaksanakan Revitalisasi, *Ketiga*, mengetahui perbandingan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA yang berada di daerah mayoritas muslim dan daerah minoritas muslim.



Layanan KUA dapat dikategorikan dalam dua kategori layanan yaitu: (a) Layanan Pencatatan Perkawinan; dan (b) Layanan Non Pencatatan Perkawinan. Hasil analisis statistik survei kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA pada tahun 2023 terhadap variabel Kepuasan Layanan KUA (Y) dalam hal pencatatan perkawinan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pengujian *t-test for equality of means*, terhadap data evaluasi tingkat kepuasan masyarakat Indonesia atas layanan KUA yang mengalami Revitalisasi dan belum menajankan Revitalisasi, didapat nilai signifikansi sebesar 0,035, artinya skor indeks kepuasan masyarakat pada layanan KUA yang mengalami Revitalisasi dan belum menajalakan Revitalisasi signifikan berbeda (tidak sama), yang bisa diartikan program



revitalisasi sudah cukup efektif karena terlihat perbedaan dampaknya (signifikan) terhadap kepuasan layanan di KUA.

Adapun indeks kepuasan masyarakat atas layanan KUA, pada KUA di daerah mayoritas muslim dan KUA di daerah minoritas muslim. Dengan melakukan pengujian *One way ANOVA*, didapatkan nilai signifikansinya sebesar 0,261, artinya skor Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan KUA di daerah mayoritas muslim dan KUA di daerah minoritas muslim signifikan tidak berbeda (sama). Hal ini dibuktikan secara pengujian *statistic bivariat* yang menunjukkan bahwa hasil kepuasan KUA di daerah mayoritas signifikan tidak berbeda dengan hasil capaian kinerja di KUA di daerah minoritas, yang bisa diartikan program pembinaan KUA sudah cukup efektif karena tidak terlihat perbedaan dampaknya (signifikan) di kedua kategori daerah.

Peran KUA sangat strategis, mengingat layanan unit kerja ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga bisa dikatakan, wajah KUA adalah wajah Kementerian Agama. Sebagai proyek percontohan (*role model*), ada 6 KUA yang sudah direvitalisasi yaitu, (a) KUA Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah), (b) KUA Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), (c) KUA Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta), (d) KUA Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), (e) KUA Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah (Lampung), dan (f) KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (Sulawesi Selatan).

Beberapa program Revitalisasi KUA yang telah dilakukan antara lain: pembangunan gedung baru, renovasi gedung (perubahan *front office*, penyediaan ruang konsultasi), peningkatan kualitas layanan, *upgrading* SDM KUA, sistem layanan dan informasi berbasis digital, pusat informasi keagamaan, pusat pemberdayaan ekonomi umat, penguatan moderasi beragama, deteksi dini atas konflik keagamaan.

Hasil survei tahun 2023, dapat menjadi *base line* bagi program Revitalisasi KUA yang dicanangkan Menteri Agama. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan KUA tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa, *Pertama*, diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan KUA memiliki rerata skor nasional signifikan di angka 83,26 termasuk kategori sangat baik (>80). Namun terdapat dua dimensi layanan yang masih rendah yaitu, sarana prasarana (77,144) dan layanan aduan (79,553).

Kedua, skor indeks kepuasan masyarakat pada layanan KUA yang mengalami Revitalisasi dan belum menajankan Revitalisasi signifikan berbeda (tidak sama), yang bisa diartikan program revitalisasi sudah cukup efektif karena terlihat perbedaan dampaknya (signifikan) terhadap kepuasan layanan di KUA.

Ketiga, skor Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan KUA di daerah mayoritas muslim dan KUA di daerah minoritas muslim signifikan tidak berbeda (sama). Maka secara kebijakan, kita dapat simpulkan bahwa layanan KUA di setiap daerah cenderung sama dan tidak adanya diskriminasi program pembinaan, yang bisa diartikan program pembinaan KUA sudah cukup efektif karena tidak terlihat perbedaan dampaknya (signifikan) di kedua kategori daerah

Namun demikian, jika ingin meningkatkan layanan KUA, maka dimensi paling rendah yang perlu ditingkatkan adalah sarana dan prasarana. Secara spesifik sarana prasarana yang menjadi skala prioritas utama yang menunjukkan indikator yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi oleh pengguna layanan namun kepuasan masyarakat rendah yaitu, (a) Gedung KUA, (b) Area Parkir, (c) Komputer/Laptop, (d) Jaringan Internet, (e) Toilet, (f) Mushollah.

Policy Paper Indeks Karakter Siswa



Pendidikan karakter telah menjadi misi utama penyelenggaraan pendidikan nasional dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, salah satu misi pembangunan pendidikan nasional adalah meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Amanat tersebut mempertegas peran pendidikan dalam mengembangkan watak dan karakter peserta didik, sekaligus memiliki integritas tinggi dalam menjalankan proses Pendidikan.

Tahun 2017 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah melakukan survei integritas peserta didik di 10 provinsi yang kemudian berdasarkan hasil survei itu disusun Indeks Integritas peserta didik Tahun 2017.

Kemudian tahun 2018 Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melakukan penyusunan indeks integritas peserta didik di 34 provinsi sebagai penyempurnaan kegiatan penyusunan indeks integritas peserta didik tahun 2017. Mulai tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023.

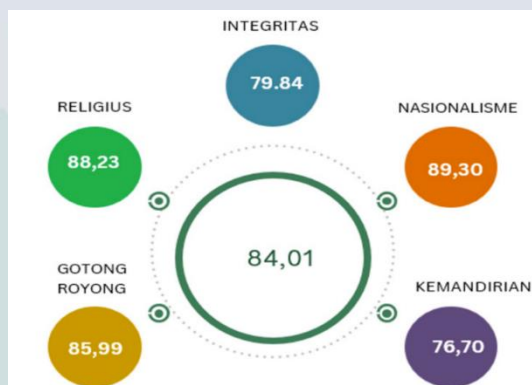
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama mengembangkan survei tentang penyempurnaan survei karakter. Kegiatan ini bertujuan untuk menjawab tiga hal utama: (i) tingkat karakter siswa Madrasah Aliyah dan Pendidikan keagamaan secara nasional; (ii) tingkat karakter siswa Madrasah Aliyah dan pendidikan keagamaan pada level Provinsi; (iii) faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya karakter siswa. Diharapkan dengan adanya survei untuk mengukur indeks karakter siswa ini, dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritik untuk pijakan dalam perumusan kebijakan pada satuan lembaga pendidikan Kementerian Agama. Survei karakter peserta didik ini, sebagaimana hasil tahun sebelumnya dilakukan untuk mengukur lima dimensi karakter, yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas.

Adapun, metodologi penelitian atau survei ini ialah pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk melihat gambaran secara diskriptif kuantitatif kecenderungan perilaku

atau opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel populasi tersebut. Sasaran survei difokuskan kepada siswa Madrasah Aliyah dan pendidikan keagamaan yang meliputi sekolah menengah Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Katolik, Utama Widya Pasraman, Sekolah Minggu Buddha, dan Sekolah Minggu Konghucu.

Sampling populasi survei karakter siswa Madrasah Aliyah tahun 2023 adalah seluruh siswa Madrasah Aliyah, baik yang berstatus negeri maupun swasta pada 34 Provinsi di Indonesia. Teknik yang digunakan ialah pengambilan sampel secara acak berjenjang (*multi stage rando sapling*). Penarikan sampel pada setiap provinsi (45 provinsi) masing-masing 15 Madrasah Aliyah dilakukan secara *proportionate stratified random* sampling berdasarkan strata status madrasah negeri dan swasta. Madrasah Aliyah menjadi primary sampling unit (PSU) dalam survei ini. Selanjutnya, pada setiap Madrasah Aliyah yang terpilih pada setiap provinsi diambil sebanyak 30 siswa secara *systematic random sampling*. Proporsi sampel 30 siswa pada Madrasah Aliyah adalah 10 siswa pada setiap jenjang kelas (X, XI, dan XII) yang terdiri dari: 5 siswa perempuan dan 5 siswa laki-laki, dengan jumlah total sampel survei pada setiap provinsi sebanyak 450 siswa, sehingga seluruh sampel survei karakter siswa Madrasah Aliyah secara Nasional tahun 2023 sebanyak 15.300 siswa. Namun perolehan realisasi sampel survei karakter siswa Madrasah Aliyah tahun 2023 secara Nasional sebanyak 15.215 responden atau realisasi 99,44% dari sampel total yang ditargetkan. Pengumpulan data survei karakter siswa Madrasah Aliyah dan pendidikan keagamaan berlangsung pada bulan Maret-April tahun 2023. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner karakter yang diberikan kepada responden survei karakter, yaitu siswa Madrasah Aliyah dan pendidikan keagamaan.

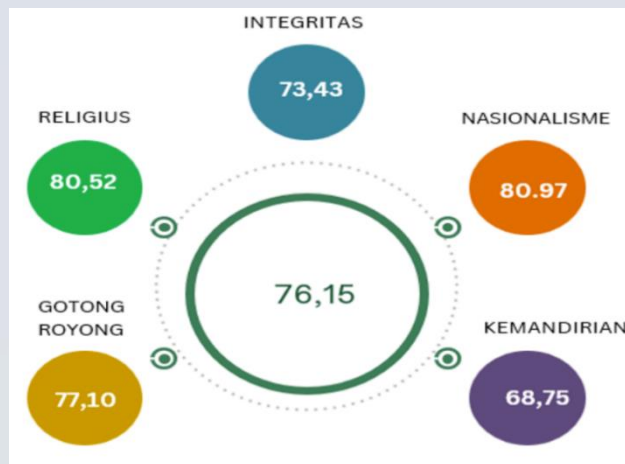
Survei karakter siswa Madrasah Aliyah yang dilaksanakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2023 menghasilkan angka indeks karakter siswa sebesar **84,01** (sangat tinggi). Indeks karakter siswa Madrasah Aliyah merupakan komposit dari terdiri: indeks dimensi religiusitas, integritas, gotong royong, nasionalisme, dan kemandirian. Indeks dimensi nasionalisme memiliki skor yang paling tinggi sebesar 89,30. Selanjutnya, skor dimensi religius sebesar 88,23 dan gotong royong sebesar 85,99. Skor dimensi integritas memiliki skor 79,84 berada pada posisi lebih rendah dari dimensi lainnya. Sedangkan skor indeks paling rendah dari semua dimensi komposit indeks karakter siswa adalah dimensi kemandirian dengan skor indeks sebesar 76,70. Sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 4

Nilai Indeks Karakter Siswa Madrasah Aliyah Tahun 2023 Berdasarkan Indikator

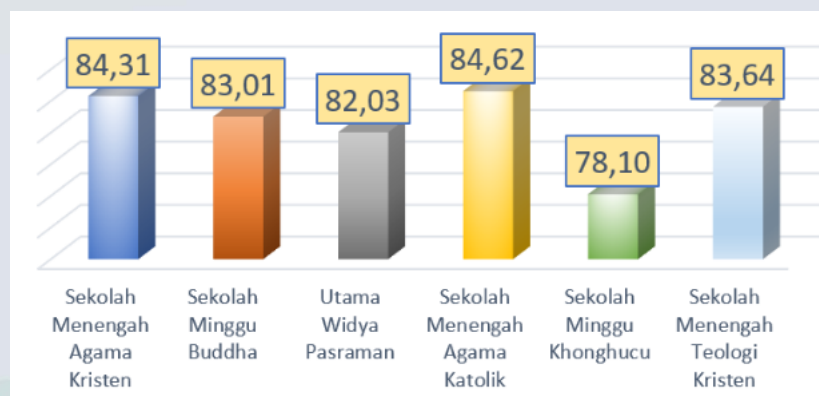
Sedangkan hasil indeks karakter siswa pendidikan keagamaan memberikan indeks karakter sebesar **76,15** (tinggi). Indeks karakter siswa pendidikan keagamaan merupakan komposit dari dimensi religiusitas, integritas, gotong royong, nasionalisme, dan kemandirian. Indeks dimensi nasionalisme memiliki skor yang paling tinggi sebesar 80,97. Selanjutnya, skor dimensi religius sebesar 80,52 dan gotong royong sebesar 77,10. Skor dimensi integritas memiliki skor 73,43 berada pada posisi lebih rendah dari dimensi lainnya. Sedangkan skor indeks paling rendah dari semua dimensi komposit indeks karakter siswa adalah dimensi kemandirian dengan skor indeks sebesar 68,75, sebagaimana diuraikan dalam diagram berikut:



Gambar 5

Nilai Indeks Karakter Siswa Pendidikan Keagamaan Tahun 2023 Berdasarkan Indikator

Nilai indeks karakter siswa Pendidikan Keagamaan dari masing-masing jenis sekolah yang di survey dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1

Indeks Karakter Siswa Pendidikan Keagamaan Tahun 2023

Berdasarkan hasil survei indeks karakter siswa tahun 2023 yang mengukur indeks karakter siswa Madrasah Aliyah dan siswa pendidikan keagamaan, diperoleh simpulan Hasil indeks karakter siswa Madrasah Aliyah secara Nasional pada 34 Provinsi di Indonesia

berada pada kategori sangat tinggi. Sedangkan indeks karakter siswa pendidikan keagamaan berada pada kategori tinggi.

Indeks karakter siswa Madrasah Aliyah dan pendidikan keagamaan tahun 2023 merupakan indeks komposit dari dimensi religius, integritas, gotong royong, nasionalisme, dan kemandirian. Hasil survei Nasional menunjukkan bahwa indeks dimensi nasionalisme mendapatkan skor paling tinggi. Sedangkan skor kemandirian memperoleh skor paling rendah dibandingkan dengan skor dimensi lainnya. Namun berdasarkan bobot (*factor loading*) dimensi pembentuk karakter siswa, dimensi gotong royong memiliki factor loading yang paling tinggi, artinya bahwa dimensi gotong royong merupakan dimensi yang paling dominan dalam membentuk karakter siswa. Sehingga Kementerian Agama dalam upaya meningkatkan karakter siswa Madrasah Aliyah dan pendidikan keagamaan memprioritaskan pada dimensi gotong royong, namun mempertimbangkan juga dimensi kemandirian siswa karena memiliki skor yang paling rendah dibandingkan dengan skor lainnya.

Rekomendasi Kebijakan

untuk mengembangkan karakter siswa, alternatif kebijakan yang direkomendasikan adalah pengembangan guru sebagai pendidik karakter. Strategi pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Memberikan contoh yang baik. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam perilaku dan nilai-nilai yang ditanamkan kepada siswa. Dalam hal ini, guru harus dapat menunjukkan konsistensi dalam perilaku dan prinsip yang diajarkan kepada siswa.
2. Pembelajaran holistik. Guru dapat mengembangkan karakter siswa melalui pembelajaran holistik yang meliputi aspek akademis, sosial, spiritual, dan emosional. Pembelajaran holistik membantu siswa memahami pentingnya nilai-nilai positif dalam kehidupan mereka.
3. Pendidikan Karakter. Guru harus mengenali nilai-nilai penting yang perlu ditanamkan pada siswa, seperti kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, tanggung jawab, dan lain-lain. Guru harus membuat program pendidikan karakter dan mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada siswa secara teratur.
4. Kegiatan Ekstrakurikuler. Guru dapat mendorong siswa untuk bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu mengembangkan karakter mereka, seperti kegiatan sosial, olahraga, dan seni.
5. Mendengarkan dan memberi umpan balik. Guru harus mendengarkan siswa dan memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu mereka mengevaluasi sikap dan perilaku mereka.

Policy Paper Relix Index Religiosity 2023

SURVEY RELIGIOSITY INDEX



Tujuan dilakukannya Pengukuran index religiusitas ialah untuk melihat potret empirik bagaimana kehidupan keagamaan dan kebangsaan di masyarakat. Dengan melakukan penelitian berbasis pada data empirik, Relix ini memberikan spektrum yang lebih komprehensif terkait kehidupan


beragama, dimana dimensi pengukuran tidak hanya sebatas pada isu-isu keagamaan dan kebangsaan semata, namun juga memuat berbagai informasi terkait beberapa isu penting seperti isu lingkungan. Kesemuanya tentu akan bermanfaat (*sustainable development goals*). *Output* hasil relis ini akan menjadi bagian penting untuk menentukan strategi kebijakan penguatan umat beragama berbasis penelitian.

Metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian pengukuran indeks religiusitas ialah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 4.058 responden dari 34 Provinsi di Indonesia. pengumpulan data berdasarkan wawancara tatap muka dengan responden rentang usia 17-65 Tahun. metode wawancara tatap muka ini menggunakan pendekatan multistage random sampling yang dilaksanakan pada 5 sampai dengan 15 Juli 2023. Adapun, sebaran sampel responden dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 6
Sebaran sampel responden Religiosity Index 2023

Dalam riset ini diperoleh hasil index religiusitas dalam skala nasional yang tinggi yakni 69,33, dengan tingkat kesalehan individual berada pada posisi tertinggi, namun sayangnya dalam konteks dimensi keagamaan berada pada posisi terendah 64,38. Kesalehan Individual yang berada dalam posisi 74,22, apabila ditarik dalam dimensi *behavior* maka tidak berbanding lurus, kesalehan individu tidak menjadi koheren dengan *behavior* yang berada pada 66,94.



“Religiosity Index tahun 2023 menunjukkan angka rata-rata nasional yaitu **69,33** yang berarti telah masuk dalam skala Tinggi”

Pada bagian lain terkait persaudaraan internal umat beragama memiliki solidaritas yang berada diatas rata rata nasional, yakni 65,41, namun saat membangun persaudaraan eksternal sesama umat beragama maka akan turun pada angka dibawah rata2 nasional (64,38), yakni 63,35. Begitu juga dengan kemauan berbangsa dan bernegara berada pada nilai indeks tertinggi (68,52), namun ketika diuji dengan kemauan kesetaraan ternyata berada pada titik terendah (62,76).

Penelitian pengukuran indeks ini juga menemukan bahwa adanya data secara demografis yang perlu mendapatkan perhatian, indeks religiusitas pada generasi *baby boomer* tidak memiliki masalah namun akan berbeda dengan generasi Z. Dimana, dimensi keagamaan generasi Z memiliki angka rendah (64,54), begitu juga untuk generasi milenial, generasi x dan generasi *baby boomer*, masing masing berada pada angka dimensi keagamaan rendah (64,34), dimensi keagamaan terendah (64,23), *Baby Boomer*, dimensi keagamaan terendah (64,68).

Melihat angka-angka tersebut menyiratkan bahwa dalam konteks internalisasi nilai keagamaan dalam konteks internal dapat dinilai baik sekali, namun sayangnya ketika kesalehan tersebut diaktualisasikan dalam lingkup antar umat beragama dan lingkungan hidup, ternyata ditemukan permasalahan, yakni teradapat perbedaan yang meski demikian tidak begitu signifikan namun dapat dimaknai sebagai adanya inkonsistensi umat beragama dalam konteks kesalehan individu dan kesalehan sosial.

Untuk menjawab problematika temuan penelitian pengukuran indeks religiusitas ini, maka diberikan rekomendasi alternatif jangka panjang sebagai berikut:

a. Revitalisasi Pendidikan Keagamaan

Pemerintah perlu mencermati pendidikan keagamaan yang selama ini dilakukan, dalam konteks kognitif/pengetahuan keagamaan belum dibarengi dengan praktek/perilaku beragama. Pengamalan nilai-nilai beragama perlu ditanamkan oleh pemerintah sehingga aspek perilaku beragama meningkat, dan diperlukan pendidikan yang mengintegrasikan nilai keagamaan-nilai kebangsaan.

b. Penguatan Dakwah Bagi Generasi Milenial dan Generasi Z

Konten dakwah moderasi beragama bagi generasi milenial dan generasi dengan berbagai kemasan perlu didorong, penggunaan berbagai saluran media perlu didorong secara massif dan tentunya perlu juga mendorong influencer sekaligus dai untuk mengisi dakwah digital secara konsisten.

c. Program Interfaith Bagi Generasi Z

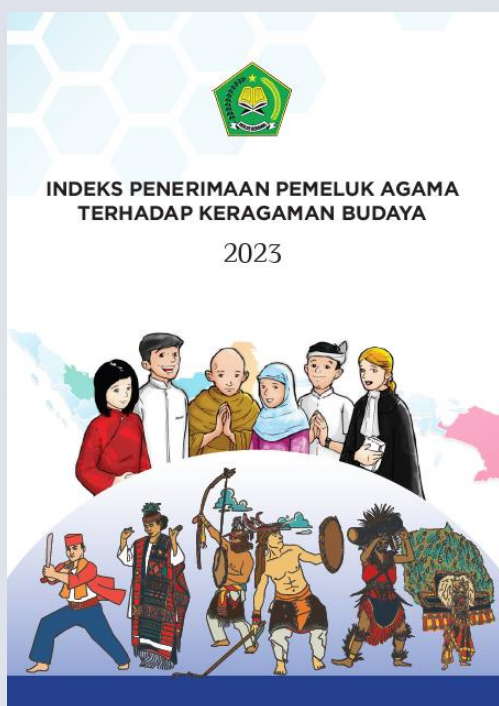
Program saling mengenal secara sosial antar pemeluk agama bagi generasi z, perlu ada ruang bagi generasi Z berbagi pengalaman membangun dan menjaga toleransi antar sesama.

d. Penguatan Fiqih Lingkungan

Diskursus fiqih lingkungan sebagaimana pendidikan keagamaan perlu didesain agar tidak hanya terfokus pada bagaimana ajaran keagamaan terkait upaya menjaga lingkungan, namun juga bagaimana sisi afektif dan psikomotorik umat beragama diupayakan peduli terhadap bagaimana memelihara lingkungan mulai dari aspek yang sederhana hingga aspek yang kompleks.

Policy Paper Evaluasi Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya

“Dialog antar agama dan lintas agama dalam prespektif moderasi beragama perlu diarahkan pada pencegahan penggunaan politik identitas (khususnya dalam konteks pemilu serentak), dan pentingnya kemanfaatan budaya untuk menjaga harmoni umat beragama dan kemajuan bangsa”.



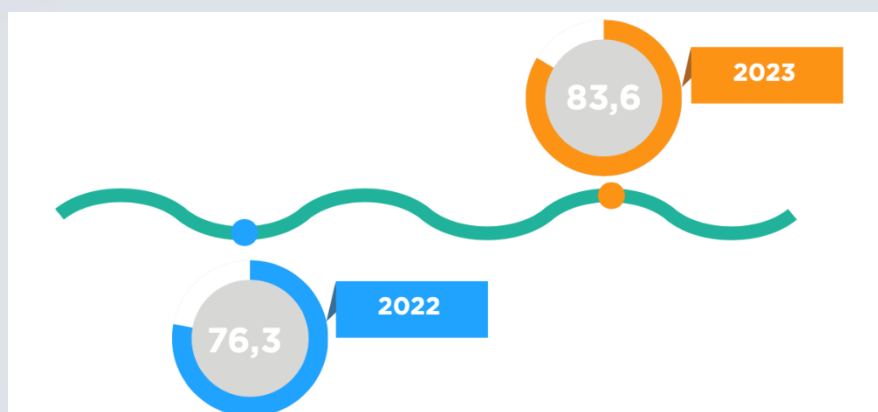
Salah satu Misi Pembanguna Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 adalah “kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa”. Mandat kepada Kementerian Agama untuk pencapaian visi pembangunan tersebut adalah melalui kebijakan memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama (Renstra Kemenag RI 2020-2024). Diantaranya adalah dengan tercapainya sasaran strategis program peningkatan keselarasan relasi antara agama dan budaya. Yakni dengan indikator menguatnya penerimaan umat beragama atas keragaman budaya serta menurunnya potensi konflik atas nama agama suku dan ras di Indonesia.

2024. Salah satu indikator tersebut ialah Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya. Selanjutnya, Badan Litbang dan Diklat telah melakukan riset/kajian/penelitian untuk mengukur indeks yang terkait dengan variable misi Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Agama untuk melihat sejauh mana sikap pemeluk agama tentang relasi agama dan budaya

serta potensi konflik terkait keragaman tradisi, ritual dan khazanah budaya dengan ajaran agama.

Penelitian menggunakan metode survei kuantitatif secara nasional. teknik sampling menggunakan *stratified random sampling* dengan jumlah sampling sebesar 1000 responden, dan *margin of error* sebesar 3.2%. Pelaksanaan survei dilakukan pada 1-20 Mei 2023. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara tatap muka langsung oleh tenaga *surveyor* terlatih berdasarkan kuisioner yang telah diuji validitasnya.

Dalam riset ini, indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya diukur melalui komposit dua variabel utama yaitu apresiasi terhadap budaya secara universal (UNESCO), dan kognisi penerimaan pemeluk agama terhadap tradisi dan budaya lokal (indikator Moderasi Agama Kemenag; Pemajuan Budaya Kemendikbud). Akomodatif terhadap budaya dalam riset ini dimaknai sebagai adanya relasi agama dan budaya yang saling memberikan kemanfaatan dalam keseharian bagi pemeluk agama/masyarakat, dan tidak menolak penerapan tradisi dan budaya lokal pada masyarakatnya. Berdasarkan dua indikator tersebut diperoleh hasil indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya **sebesar skor 83,6 poin** dan meningkat sebesar 7,3 dibanding tahun sebelumnya. Dengan itu dapat diartikan indeks penerimaan pemeluk agama atas keragaman budaya **dalam kategori sangat tinggi/sangat moderat**.



Gambar 7

Tren Indeks Penerimaan Umat Beragama atas Keragaman Budaya (2022 dan 2023)

Analisis dalam penelitian ini menguraikan bahwa:

1. Indeks potensi konflik berlatar agama dan etnis terkonfirmasi menurun 4,2 dibanding tahun sebelumnya, yaitu dari skor 35,2 di Tahun 2022 dan menurun menjadi 31,0. %.
2. Indeks potensi konflik adalah skor komposit yang menunjukkan tingkat kerentanan timbulnya konflik sosial (baik yang bersifat kekerasan fisik dan verbal, atau dalam bentuk ketegangan sosial, sikap bermusuhan dan sikap saling membenci) antargolongan khususnya agama dan suku dalam masyarakat yang pluralis. Potensi ini bisa memiliki rentang rendah sampai tinggi tergantung tinggi rendahnya indikator-indikator determinan konflik tersebut. Adapun indikator yang dimaksud mencakup indikator perdamaian (faktor protektif) & konflik (faktor risiko). Variabel pengukuran adalah (1). Dukungan terhadap Demokrasi; (2) Intoleransi beragama

antar sesama pemeluk agama; (3) Intoleransi beragama antar agama; (4). Perasaan Keteranacaman; (5). Narsisme politik; (6). Intoleransi politik; (7). Dukungan terhadap kekerasan; (8).Intensi aksi kekerasan; (9). Riwayat konflik sebelumnya; dan (10) Ideologi kekerasan.

3. Akomodasi pemeluk agama terhadap budaya lokal masih bersifat kognitif saja atau sebatas apresiasi terhadap warisan leluhur, tetapi untuk mempraktikanya sulit diterima sebagai keseharian, terlebih jika budaya tersebut dipandang tidak mencerminkan pemahaman keagamaannya.
4. Indeks penerimaan pemeluk agama terhadap budaya sebesar **sebesar skor 83,6 poin**. Dengan itu dapat diartikan indeks penerimaan pemeluk agama atas keragaman budaya **dalam kategori sangat tinggi/ sangat moderat**.
5. Indeks Moderasi beragama adalah kebijakan utama pada Kementerian Agama yang sekaligus menjadi mandatori Presiden kepada Menteri Agama. Survei kali ini mencatat *tracking* menarik di mana perkembangan indeks moderasi beragama di Indonesia semakin lebih baik meningkat 5,7 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 80,1 (2022) menjadi 86,5 (2023).

Temuan atas Survey ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, Indeks potensi konflik berlatar belakang agama dan budaya semakin menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini adalah capaian keberhasilan yang baik bagi Kementerian Agama dalam hal mencegah peluang konflik atas nama agama dan etnis. Tetapi, di sisi lain survei ini juga mendeteksi adanya ancaman menguatnya penggunaan politik identitas menjelang pilpres dan pilkada serentak 2024.

Kedua, Indeks Penerimaan pemeluk agama terhadap budaya terkategori moderat. Artinya pemeluk agama menerima dan mampu melakukan akomodasi terhadap keragaman budaya lokal. Meskipun penerimaan dimaksud dalam level kognitif dan afektif (apresiasi) saja, belum pada level pembudayaan (pembiasaan) untuk kesehariannya.

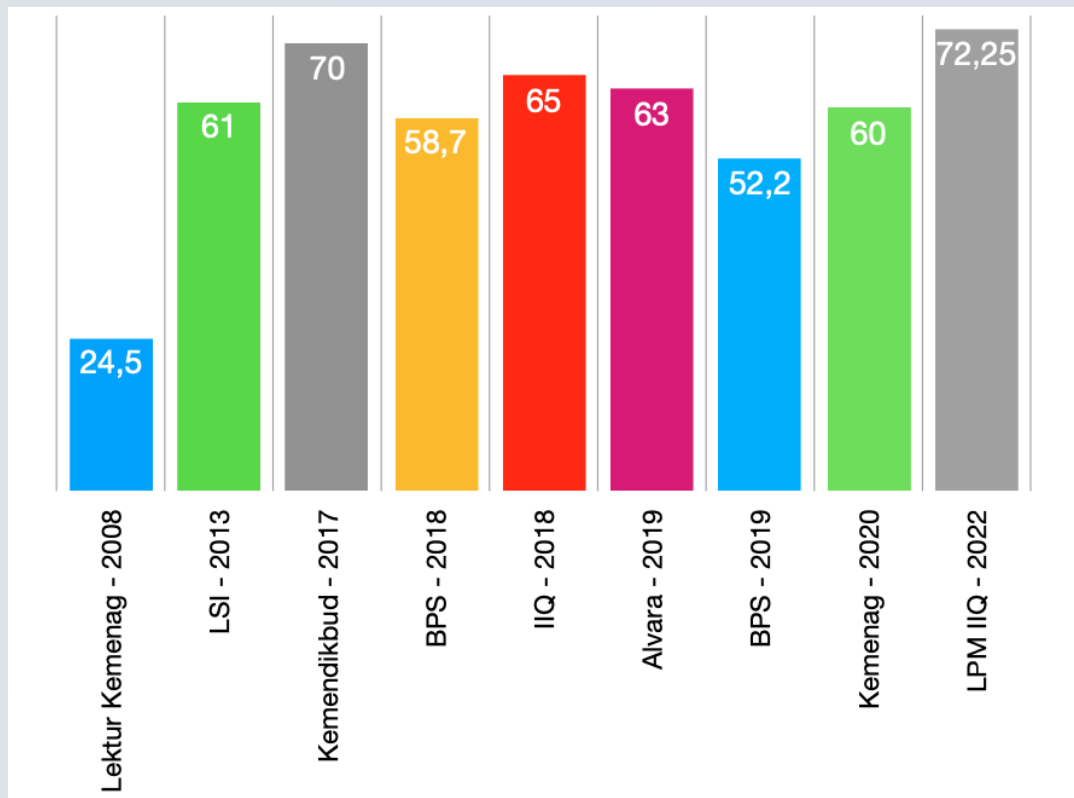
Ketiga, Dialog antar agama dan lintas agama dalam prespektif moderasi beragama perlu diarahkan pada pencegahan penggunaan politik identitas (khususnya dalam konteks pemilu serentak), dan pentingnya kemanfaatan budaya untuk menjaga harmoni umat beragama dan kemajuan bangsa

Policy Paper Indeks Baca Tulis Al-Qur'an bagi SLTP dan SLTA



Pengukuran Indeks baca tulis Al-Qur'an pada peserta didik di tingkat SLTP dan SLTA bertujuan untuk mendukung capaian kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang tertuang dalam Renstra Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Yakni bahwasannya pembiasaan kesalehan di lingkungan keluarga memberikan pengaruh yang tinggi terhadap pelestarian tradisi keagamaan seperti ibadah literasi kitab suci dan silaturahmi antar sesama. Penelitian ini, didasarkan pada tesis bahwa Indonesia tengah mengalami

kemerosotan tingkat literasi baca tulis Al-Qur'an. Dalam riset terdahulu, disimpulkan bahwa tingkat buta aksara Al-Qur'an di Indonesia mencapai 72%.



Grafik 2
Riset Baca Tulis Al-Qur'an Tahun 2008-2022

Kemampuan membaca, menulis dan memahami Al-Qur'an adalah bagian dari kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik di tingkat pendidikan dasar, menengah dan atas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah; dan Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah.

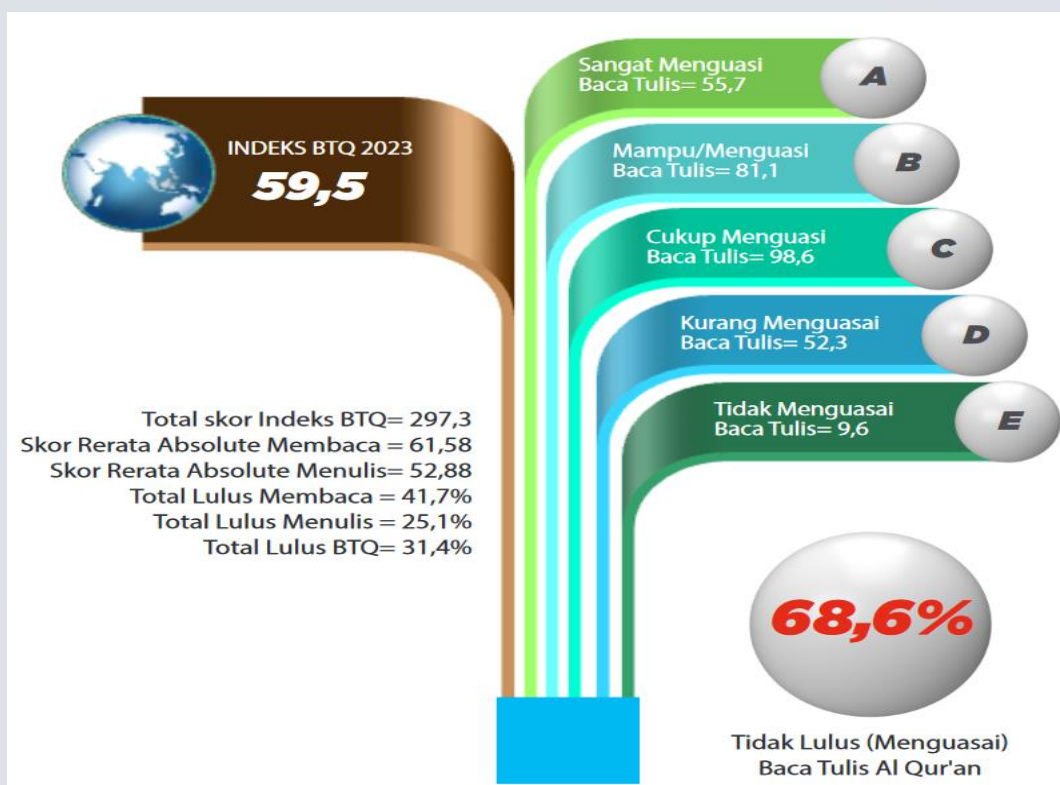
Variabel utama yang digunakan untuk mengukur indeks baca tulis Al Qur'an adalah sebagai berikut: (1). Kemampuan membaca terdiri dari ketepatan tajwid, kelancaran membaca, kefasihan membaca, penguasaan bacaan ayat-ayat sulit dan adab memperlakukan Al Qur'an; (2). Kemampuan menulis terdiri dari pengenalan huruf hijaiyah, menyambung kata dan kalimat, menulis 1 surah tertentu tentang hubungan antar sesama manusia, kerapian, kecepatan dan keindahan dalam menulis ayat Al Qur'an. Adapun survey dilakukan pada bulan Agustus Tahun 2023.

Sementara untuk faktor kausal yang memungkinkan memengaruhi capaian hasil belajar membaca dan menulis Al-Qur'an adalah motivasi belajar, waktu belajar, usia belajar,

tenaga pengajar, lama belajar, metode belajar, kegiatan pendukung pembelajaran lainnya. Nilai Indeks Baca Tulis Al-Qur'an Tahun 2023 Nasional dan per Provinsi, dapat dilihat sebagaimana tabel dan gambar berikut:

Tabel 13
Level Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an Berdasarkan Sebaran Provinsi

PROPINSI	Membaca		Menulis		Baca Tulis	
	TIDAK LULUS	LULUS	TIDAK LULUS	LULUS	TIDAK LULUS	LULUS
1. Aceh	34,4	65,6	43,8	56,3	31,3	68,8
2. Sumatera Utara	62,5	37,5	69,6	30,4	66,1	33,9
3. Sumatera Barat	35	65	75	25	50	50
4. Riau	42,9	57,1	57,1	42,9	53,6	46,4
5. Jambi	62,5	37,5	62,5	37,5	62,5	37,5
6. SUM-SEL	54,2	45,8	75	25	62,5	37,5
7. Bengkulu	100	0,0	100	0	100	0,0
8. Lampung	43,8	56,3	62,5	37,5	56,3	43,8
9. Bangka Belitung	0,0	100	25	75	0	100
10. Kepri	75	25	100	0	75	25,0
11. DKI Jakarta	46,9	53,1	59,4	40,6	56,3	43,8
12. Jawa Barat	49,3	50,7	66	34	52,8	47,2
13. Jawa Tengah	75	25	90	10	86,3	13,8
14. Yogyakarta	58,3	41,7	66,7	33,3	58,3	41,7
15. Jawa Timur	59,2	40,8	75,8	24,2	68,3	31,7
16. BANTEN	45,	55	60	40	57,5	42,5
17. Bali	75	25	87,5	12,5	87,5	12,5
18. NTB	79,2	20,8	87,5	12,5	87,5	12,5
19. NTT	57,5	42,5	85	15	80	20
20. Kalbar	58,3	41,7	79,2	20,8	79,2	20,8
21. Kalteng	93,8	6,3	100	0,0	100	0
22. Kalsel	16,7	83,3	75,0	25	66,7	33,3
23. Kaltim	81,3	18,8	100	0,0	100	0,0
24. Kaltara	100	0,0	100	0,0	100	0,0
25. Sulut	37,5	62,5	68,8	31,3	62,5	37,5
26. Sulteng	75	25	68,8	31,3	75	25
27. Sulsel	72,2	27,8	94,4	5,6	94,4	5,6
28. Sultra	68,8	31,3	81,3	18,8	81,3	18,8
29. Gorontalo	87,5	12,5	87,5	12,5	87,5	12,5
30. Sulbar	62,5	37,5	87,5	12,5	87,5	12,5
31. Maluku	50	50	68,8	31,3	68,8	31,3
32. Maluku Utara	50,	50	100	0,0	75	25
33. Papua	75	25	93,8	6,3	93,8	6,3
34. Papua Barat	100	0,0	100	0,0	100	0,0
RERATA	58,3	41,7	74,9	25,1	68,6	31,4
	100		100		100	



Gambar 8
Indeks Baca Tulis Al-Qur'an Peserta Didik SLTP dan SLTA Tahun 2023

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, pada tahun 2023 terhadap indeks Baca tulis Al-Quran Peserta Didik SLTP dan SLTA se-Indonesia menyajikan laporan Indeks Baca Tulis Al-Qur'an menyentuh Skor 59,5% dan Tidak Lulus (menguasai) 68,6%. Dengan rincian indeksasi survey sebagai berikut: Sangat Menguasai Baca Tulis sebesar 55,7%, mampu/menguasai Baca Tulis Al-Qur'an sebesar 81,1, Cukup Menguasai sebesar 98,6%, Kurang Menguasai Baca Tulis sebesar 52,3%, dan Menguasai Baca Tulis sebesar 9,6%. Dengan hasil survey yang demikian, maka dapat diketahui bahwa Total Skor BTQ sebesar 297,3; skor rerata Absolut membaca sebesar 61,58%; skor rerata Absolute Menulis sebesar 52,88% dengan rincian Total Lulus Membaca 41,7%; Total Lulus Menulis sebesar 25,1% dan Total Lulus BTQ sebesar 31,4%.

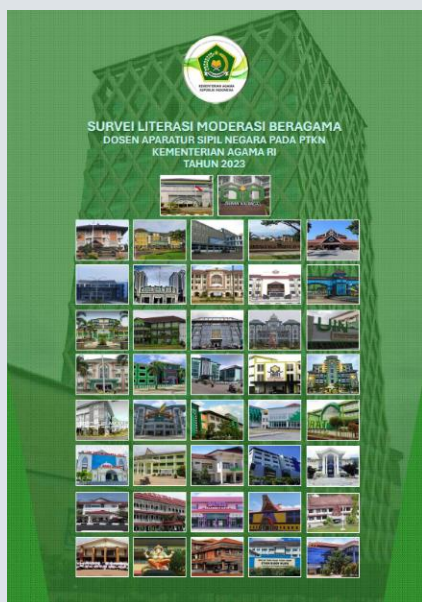
Terhadap temuan survey indeksasi Baca Tulis Alqur'an terhadap peserta didik SLTP dan SLTA Se-Indonesia, pada Tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas, maka Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memberikan rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan level kompetensi peserta didik dalam membaca an menulis Al-Qur'an sesuai standar kompetensi lulusan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
2. Menetapkan target pencapaian pengembangan kompetensi membaca dan menulis Al-Qur'an sesuai kemajuan pembelajaran peserta didik di setiap satuan pendidikan;
3. Mengoptimalkan capaian pembelajaran baca tulis Al-Qur'an secara kolaboratif dengan beberapa muatan mata pelajaran lainnya yang dipandang relevan, atau pembelajaran ekstrakurikuler dan atau pembelajaran berbasis proyek sebagai satu kesatuan;

4. Mengoptimalkan capaian pembelajaran baca tulis Al-Qur'an dengan melibatkan peran serta masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an baik di Keluarga (rumah), masjid, mushalla, diniyah, pesantren dan lainnya;
5. Strategi pembelajaran yang dirancang perlu dikembangkan sehingga memberikan pengalaman belajar yang berkualitas, menyenangkan dan membantu peserta didik semakin termotivasi dan meningkat kompetensinya dalam membaca dan menulis Al-Qur'an;
6. Pembelajaran kitab suci yang menyenangkan disarankan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memotivasi peserta didik semakin merasa mudah belajar Al-Qur'an; dan
7. Perlu dilakukan supervisi capaian pembelajaran dan tujuan belajar Al-Qur'an oleh satuan pendidikan, monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Badan Litbang dan Diklat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali.

Policy Paper Survey Literasi Moderasi Beragama Bagi Dosen ASN Pada PTKN

“Moderasi beragama adalah modal dasar bagi ASN untuk terus berupaya meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”



Setiap ASN Kementerian Agama RI penting untuk terus *update* tentang kebijakan moderasi beragama baik tentang penguatan cara pandang, kerukunan umat beragama, penyelarasan agama dan budaya, peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, termasuk upaya menjadikan sumber daya keagamaan sebagai pendorong perekonomian umat. Program Penguatan Moderasi Beragama dalam lingkup Kementerian Agama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, telah menyasar bagi pegawai, pejabat, dosen hingga mahasiswa (mahasiswa dilingkup Universitas yang dibina oleh Kementerian Agama). berdasarkan data Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam tahun 2021, Peguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) telah

melaporkan kegiatan Moderasi Beragama yaitu: (1) UIN Malang, (2) IAIN Cirebon, (3) UIN Bandung, (4) IAIN Metro, (5) IAIN Surakarta, (6) IAIN Salatiga, (7) UIN Walisongo, (8) UIN STS Jambi, (9) IAIN Kudus, (10) STAIN Meulaboh, (11) UIN Raden Intan Lampung, (12) IAIN Palu, (13) IAIN Purwokerto, (14) IAIN Pekalongan, (15) UIN Banten (16) UIN Sunan Ampel



Surabaya, (17) IAIN Curup, (18) UIN Mataram, (19) UIN Jember), (20) IAIN Samarinda, (21) UIN Sunan Kalijaga Jogja, (22) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (23) IAIN Ternate, (24) UIN Antasari Banjarmasin, (25) IAIN Palangka Raya, (26) UIN Alauddin Makassar, (27) IAIN Madura, (28) UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (29) IAIN Bukittinggi, (30) IAIN Pontianak, (31) STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, (32) IAIN Manado, (33) UIN Sumatera Utara, (34) IAIN Palopo, (35) IAIN Tulungagung, (36) UIN Banda Aceh, (37) IAIN Kendari, (38) IAIN Bone, (39) UIN Bengkulu, (40) UIN Palembang.

Dalam kesempatan tahun ini (2023) Badan Litbang dan Diklat melakukan penelitian dalam bentuk survey untuk mengukur indeks Modersis Beragama dan tingkat literasi Moderasi Beragama di Lingkungan Dosen ASN Kementerian Agama RI. Adapun dalam survey ini, alat ukur yang digunakan ialah menggunakan 4 (empat) indikator Moderasi Beragama yaitu, Komitmen Kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Sementara literasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan kognitif (*cognitive skills*) dari ASN dalam mengidentifikasi, memahami, dan menginterpretasi moderasi beragama untuk ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif bagi penguatan kerukunan hidup ummat beragama.

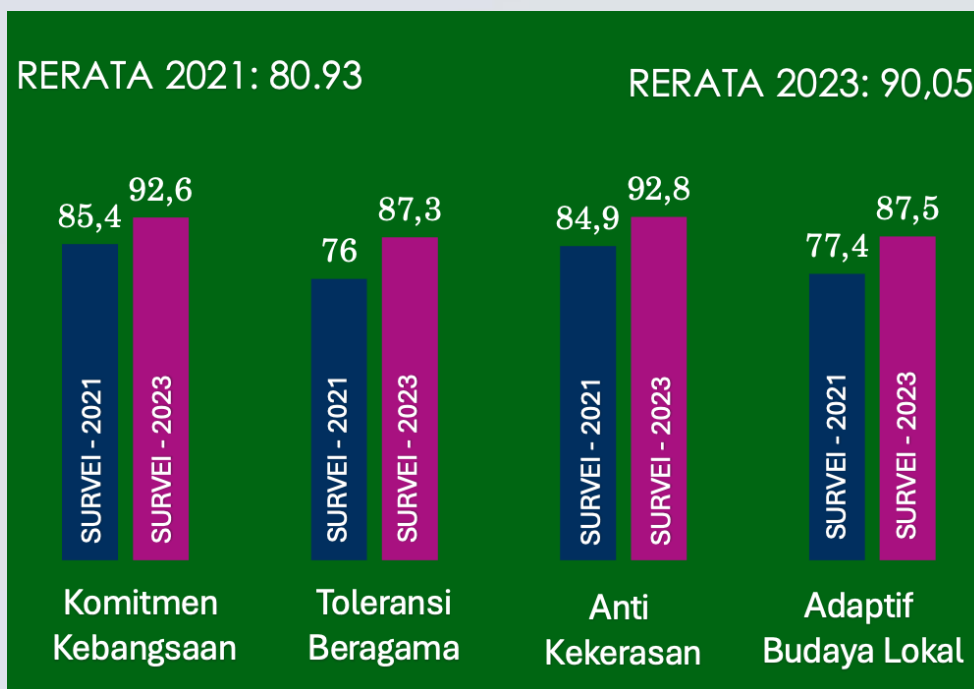
Selain itu pengukuran literasi moderasi beragama untuk Dosen ASN Kementerian Agama tahun ini adalah sekuel dari temuan survei nasional sebelumnya di tahun 2021. Dimana secara umum pada tahun 2021 indeks moderasi beragama yang dikhususkan pada PNS Kanwil dan Kabupaten/Kota di lingkungan Kementerian Agama menunjukkan tingkat pemahaman moderasi beragama dalam kategori sangat tinggi, yaitu rerata 80.9. Untuk tingkat literasi moderasi beragama dalam kategori sedang, yaitu rerata 53.6; dan indeks literasi moderasi beragama secara nasional berada dalam kategori tinggi, yaitu rerata 67. Konteks hasil tersebut perlu untuk dikaji secara berkelanjutan untuk mendapatkan informasi capaian progress penguatan moderasi beragama yang telah dilakukan selama kurun waktu setahun terakhir.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei-kuantitatif. Instrumen riset menggunakan kuisioner yang disusun secara sistematis mencakup indikator moderasi beragama dan tingkat literasi digital dan moderasi beragama. Yakni dengan mengajukan pertanyaan mengacu pada 4 (empat) indikator moderasi beragama yang telah dicanangkan oleh Kementerian Agama RI, 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) antikekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dan tiga indikator literasi 1) kemampuan mengidentifikasi, (2). kemampuan memahami, (3) kemampuan menginterpretasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan moderasi beragama.

Pengambilan sampel pada populasi Dosen ASN Kementerian Agama menggunakan metode proportional random sampling. Metode sampling ini dilakukan dengan proses dua langkah yang mana populasi dibagi menjadi subpopulasi atau tingkatan. Populasi Dosen ASN dalam penelitian ini relatif homogen sehingga cukup dipilah secara proporsional. Pemilihan proporsi Dosen ASN berdasarkan proporsi jumlah dosen per kampus, jenis kelamin, dan jabatan fungsional menurut data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) masing-masing satuan kerja. Jabatan kepangkatan fungsional dosen dimaksud adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Professor (Guru Besar).

Adapun teknik analisis yang digunakan adalah statistic deskriptif, inferensial dan dilengkapi dengan pengukuran indeks. Indeks dihitung melalui skor dari masing- masing indikator dikumpulkan ke dalam skor pilar, skor masing-masing pilar dikumpulkan ke dalam skor sub-indeks, dan skor masing-masing sub-indeks dikumpulkan menjadi skor keseluruhan indeks. Setiap indikator membawa bobot yang sama untuk skor masing masing pilar. Demikian pula skor sub-indeks membawa bobot yang sama ke dalam indeks.

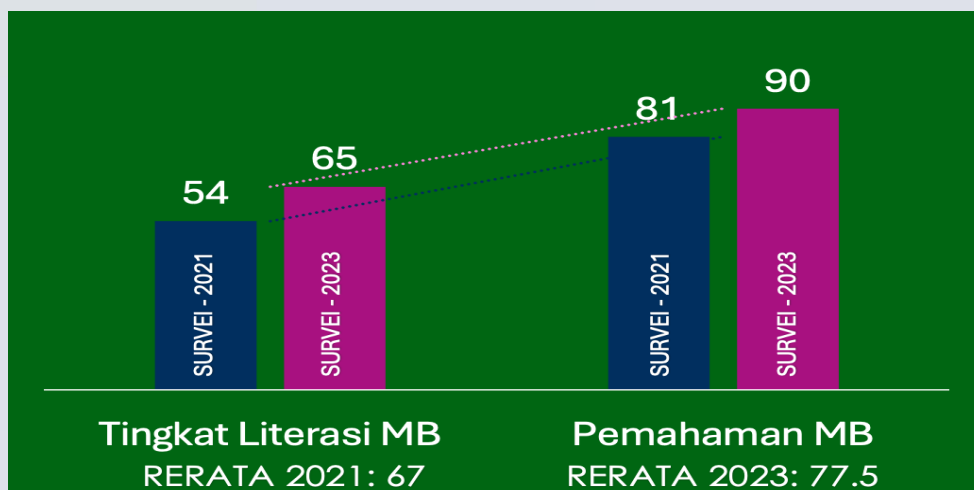
Indikator moderasi beragama yang meningkat cukup signifikan dari tahun 2001-2023 adalah pada aspek penguatan toleransi beragama dan adaptif terhadap budaya local. Meskipun kedua aspek ini masih lebih rendah dibanding dengan dua aspek lainnya yaitu komitmen kebangsaan dan anti kekerasan. Pada 2021 pemahaman toleransi beragama diperoleh nilai skor 76 dan meningkat 2023 menjadi 87, 3. Demikian halnya dengan aspek adaptif terhadap budaya lokal meningkat dari skor 77,4 menjadi 87,5 sebagaimana diuraikan dalam grafik berikut:



Grafik 3
Skor Capaian Indeks Moderasi Beragama Berdasarkan Indikator

selain itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat literasi Moderasi Beragama selalu mengalami kenaikan yang signifikan dari rentang tahun 2021-2023, hal ini mengindikasikan tingkat literasi moderasi beragama berkontribusi positif terhadap peningkatan pemahaman dan sikap dosen tentang moderasi beragama. Temuan ini menguatkan konstruksi teoritis yang dibangun dalam riset ini bahwasanya pembudayaan moderasi beragama perlu dilakukan melalui penguatan literasi digital. Literasi moderasi beragama tidak saja dimaksudkan untuk peningkatan pengetahuan secara individual, tetapi bagaimana moderasi beragama dapat ditransfer, dikomunikasikan, didialogkan dan

dibudayakan kepada masyarakat luas melalui media digital. Berikut ditampilkan grafik perbandingan Literasi Moderasi Beragama berdasarkan tahun riset 2021-2023



Grafik 4
Skor Tingkat Literasi Moderasi Beragama

Adapun, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, *Pertama*, Tingkat pemahaman Moderasi Beragama secara nasional berada dalam kategori sangat baik, yaitu rerata skor 90. Pemahaman moderasi beragama telah tersosialisasikan dengan baik di kalangan dosen ASN Kementerian Agama RI. Jika dibandingkan dengan data yang serupa (2021), hasil ini mengalami peningkatan sebesar 9 poin, yaitu dari nilai rerata 81 menjadi 90.

Kedua, tingkat literasi Moderasi Beragama secara nasional berada dalam kategori tinggi, yaitu rerata 64,8. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Dosen ASN Kementerian Agama telah cakap menggunakan media digital untuk kebutuhan penguatan moderasi beragama di lingkungan kerjanya. Jika dibandingkan dengan data yang serupa (2021), hasil ini mengalami peningkatan sebesar 11,2 poin, yaitu dari nilai rerata 53,6 menjadi 64,8.

Ketiga, Indeks literasi moderasi beragama secara nasional berada dalam kategori tinggi, yaitu rerata 77,5 atau meningkat dibanding tahun 2021 sebesar nilai rerata 67. Hal ini dapat disimpulkan PNS Kementerian agama berhasil mengoptimalkan pemahamannya yang moderat untuk kegiatan-kegiatan moderasi beragama di lingkungannya, baik bersifat pribadi, institusi dan kemasyarakatan.

IKU Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian

Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian, dari target 87%, terealisasi 100%, sehingga capaian kinerjanya 114,94%. Hasil publikasi telah dilakukan pada semua produk penelitian melalui aplikasi simlitbang <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/>. selain itu bentuk publikasi juga dilakukan melalui jurnal yang ada pada Balitbangdiklat seperti jurnal Analisa, Harmoni, Edukasi,

Herritage of Nusantara, Al-Qolam, Penamas dan lainnya. Publikasi juga dilakukan melalui <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>

Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja tahun 2023 sudah tercapai bahkan melampaui target (111,11%), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 14
Capaian Indikator Persentase Publikasi Hasil Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	80%	82%	85%	87%	90%	Sudah melampaui target Renstra 2024 (+10%)
Realisasi	100%	100%	100%	100%		
%	120,00	120,00	117,65	114,94	111,11	

Evidence pencapaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada *link* berikut:

1. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/hindari-kontradiksi-hasil-uji-coba-instrumen-perlu-berulang-kali>
2. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/survei-pisa-siswa-madrasah-jadi-program-mandatory-kaban>
3. <https://drive.google.com/drive/folders/1Kc6UqIDY7zzdTvSXotMlrxOg0jtQroZT?usp=sharing>
4. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/wujudkan-pendidikan-inklusif-dan-berkualitas-puslitbang-penda-gandeng-peneliti-brin>
5. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/tiga-kriteria-dalam-peningkatan-layanan-madrasah-inklusif>
6. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/utamakan-pertanggungjawaban-akademik-puslitbang-penda-perluas-pemetaan-survei-madrasah-inklusif>
7. <http://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/rumuskan-naskah-kebijakan-madrasah-ramah-anak-puslitbang-penda-gandeng-direktorat-kskk>
8. <https://nu.or.id/nasional/kemenag-seminarkan-hasil-penelitian-indeks-karakter-siswa-2023-nNXnS>
10. <https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni>
11. https://statcounter.com/p11616064/summary/?account_id=7142886&login_id=5&code=5b6efeb93d14d770fb9e6cec77fc846f&quest_login=1
12. https://www.youtube.com/results?search_query=puslitbang+kemenag+channel
13. <https://www.instagram.com/puslitbang1.kemenag/>
14. <https://stainupwr.ac.id/index.php/2022/03/24/puslitbang-bimas-agama-dan-layanan-keagamaan-berikan-bantuan-buku/>
15. <https://www.antaranews.com/berita/3785226/kemenag-indeks-kerukunan-umat-beragama-di-kepri-tahun-2023-tinggi>
16. <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/kunjungan-puslitbang-bimas-agama-dan-layanan-keagamaan-sekaligus-pemberitahuan-evaluasi-indeks-kesalehan-sosial-umat-beragama-tahun-2023>
17. <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/48342/evaluasi-indeks-kepuasan-pelayanan-di-kua-tahun-2023>

18. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/upaya-bersama-menuju-harmoni-puslitbang-bimas-agama-selenggarakan-fgd-resolusi-konflik-bernuansa-keagamaan>
19. <https://diy.kemenag.go.id/34011-kemenag-susun-instrumen-survei-indeks-kerukunan-umat-beragama-2023.html>
20. <https://kemenag.go.id/nasional/pemuda-lintas-agama-ikuti-kemah-moderasi-beragama-jGika>
21. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/ajang-pembuktian-talenta-peserta-msib-hasilkan-sejumlah-proyek-monumental>



Gambar 9
Jurnal pada Badan Litbang dan Diklat

SINTA Author Subjects Affiliations Sources FAQ WCU Registration Login

HARMONI
MENGOLAH KERAGAMAN, MERAWAT KERUKUNAN

HARMONI
PUSLITBANG BIMAS AGAMA DAN LAYANAN KEAGAMAAN, BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

P-ISSN : 1412663X <> E-ISSN : 25028472 Subject Area : Education

2.54054
Impact Factor

2086
Google Citations

Sinta 3
Current Accreditation

Google Scholar Garuda Website Editor URL

Gambar 10
Jurnal Harmoni




Gambar 11
Jurnal Heritage

IKU Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)

Produk penelitian, pengembangan, dan pengkajian yang memperoleh HAKI dari target tahun 2023 sebesar 16 HAKI, terealisasi 32 HAKI, sehingga capaian kinerjanya 120%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2024 yaitu 65 HAKI maka akumulasi capaian kinerja tahun 2023 sebesar 95 HAKI sudah tercapai bahkan melampaui target (120%), terdiri dari capaian tahun 2020 = 9 HAKI, 2021 = 35 HAKI, 2022 = 19 HAKI, 2023 = 32 HAKI sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15
Capaian Indikator Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HAKI Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	7	17	13	16	65	Akumulasi Capaian 95 HAKI, sudah melampaui target Renstra 2024 (+40 HaKI)
Realisasi	9	35	19	32		
%	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	



Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang telah memperoleh HAKI tersebut yaitu:

HaKI Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan:

1. Dinamika dan Resolusi Konflik atas Penolakan Rumah Ibadat di Bekasi
2. Jalan Panjang Mewujudkan Keluarga Sakinah melalui KUA
3. Media dan Kontra Narasi Ekstremisme (Respon Tokoh Agama Terhadap Media Keislaman di Indonesia)
4. Pasang Surut Pendirian Gereja Dalam Perspektif Moderasi
5. Sertifikasi Halal Sebagai Modal Simbolik Usaha Makanan dan Minuman Khas Daerah
6. Dimensi Keagamaan Pangestu dan Rekognisi Penganut Kejawaen
7. Keberagaman dan Kesalehan Sosial Refleksi dan Indeks Kesalehan Sosial 2022
8. LGBT di Indonesia dalam Realitas Agama dan Dunia Maya
9. Tantangan Beragama di Era Pandemi
10. Instrumen IKS
11. Instrumen KUB

HaKI Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan:

1. Konfigurasi Nilai Moderat di Perbatasan Sumatera Utara
2. Indeks Karakter Siswa 2022
3. Indeks Karakter Siswa 2023
4. *Profiling* Pengembangan Ekonomi Pesantren
5. Pendidikan Agama di Masa Pandemi Covid-19
6. Panduan Respon Dini Konflik Keagamaan di Kalangan Pelajar
7. Pedoman Pencegahan Tindak Kekerasan Berbasis Riset di Pesantren
8. Panduan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Peserta Didik Raudhatul Athfal (RA) Pada Masa Bencana

HaKI Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi:

1. AlQuran dan Terjemahnya Bahasa Melayu Jambi
2. AlQuran dan Terjemahnya Bahasa Using Banyuwangi
3. Buku Saku Moderasi Beragama Bagi Generasi Z
4. Komik Moderasi Beragama
5. Ensiklopedi Kesultanan di Indonesia
6. Terjemah Kitab Chun Qiu Jing

HaKI Balai Litbang Agama Jakarta:

1. Buku Rukun Berpancang Amanah Moderat Bersauh Marwah;
2. Buku Dinamika Ekstrimisme Kekerasan di Indonesia
3. Buku Sufisme Jawa.

HaKI Balai Litbang Agama Semarang:

1. Kisah Ajisaka, Setya & Setuhu: Tradisi Lisan Desa Ngadas, Poncokusumo, Kabupaten Malang

2. Peran Pengawas Menuju Madrasah Berkualitas

HaKI Balai Litbang Agama Makassar:

1. SIPATTUJU (Sistem Informasi Pelaporan Teratur Dan Jitu)
2. SI EDI (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi)

Evidence pencapaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada link berikut:

<https://s.id/HaKI2023>



Gambar 12

HAKI Produk Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Analisis

Perjanjian kinerja Kepala Badan Litbang dan Diklat tahun 2023, tidak terdapat IKU tentang Persentase Manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan dan IKU tentang Tingkat Sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat. Hal tersebut disebabkan karena fungsi litbangjirap sudah tidak dijalankan oleh Badan Litbang dan Diklat. Namun demikian, secara keseluruhan akumulasi dari 3 (tiga) IKU yang tersisa yakni IKU tentang Policy Paper yang dimanfaatkan; IKU tentang Persentasi Pubikasi hasil Penelitian, Pengembangan, dan IKU Produk Penelitian, Pengembangan, Pengkajian yang memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dari sisi capaian kinerja diatas memperoleh nilai 114,94% (memuaskan). Terhadap IKU *policy paper* yang dimanfaatkan telah berdayaguna dan dapat digunakan oleh *stakeholders* dalam merumuskan kebijakan. *Policy paper* tersebut menggambarkan rumusan kebijakan (alternatif kebijakan) yang dapat diambil oleh pemangku kebijakan.

Pemanfaatan hasil penelitian secara luas kepada *stakeholders/ masyarakat* telah dilakukan melalui berbagai website/ kanal/ aplikasi. Sejak tahun 2020 telah dibangun aplikasi simlitbang berbasis android untuk menghimpun hasil penelitian dan pengembangan, tahun 2022 dilakukan penguatan dan pengoptimalan penggunaan dan pemanfaatannya.

Tahun 2021/2022 terdapat IKU tentang HAKI yang menunjukkan bahwa kualitas hasil penelitian dilindungi oleh Hak Cipta.

Rekomendasi yang masih diperlukan adalah adanya relevansi antara hasil penelitian yang menjadi *policy paper* dengan tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang ditawarkan. baik dari sisi pembentukan regulasi yang diperlukan maupun sisi teknis pelaksanaan rekomendasi yang ditawarkan. Memperkuat pengembangan data center dan digitalisasi *policy paper* atau *policy brief* hasil litbang/survey yang memudahkan pimpinan atau *stakeholders* terkait dalam mengambil kebijakan, tidak hanya yang ada di Balitbangdiklat tetapi juga unit lain di Kementerian Agama. Para pemangku kebijakan (dalam hal ini Pimpinan) dapat menetapkan peta prioritas rekomendasi secara berkala untuk menjadi program yang berkelanjutan.

A.2. Capaian Kinerja Sasaran Program II. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2023, indikator kinerja pada sasaran program meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul dipresentasikan dalam 5 (lima) IKU, yakni Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat; Alumni Pelatihan yang memenuhi standar; Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat; Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan; dan Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 16.

Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul (Area Kediklatan) Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	44,00%	57,21%	120%
	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	80.000	279.684	120%
	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	87,00%	88,17%	101,34%
	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85,80	94,35	109,96%

Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilain ISO	75,00%	69,23%	92,31%
Rerata Capaian Kinerja			108,72%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area kediklatan adalah 108,72% berada pada area sangat baik”

IKU Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat, dari target Tahun 2023 sebesar 44,00% terealisasi 57,21% atau tercapai 120%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 55% maka indikator tersebut sudah tercapai bahkan melampaui target (104,02%), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 17

Capaian Indikator Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	13%	23,5%	33,5%	44%	55%	sudah melampaui target Renstra 2024 (+2,21%)
Realisasi	13%	23,5%	33,5%	57,21%		
%	100,00	100,00	100,00	120,00	104,02	

Indikator ini diukur berdasarkan rasio Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan moderasi beragama terhadap total Alumni Pelatihan. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Cakupan Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama (PPMB) bagi tenaga teknis keagamaan sesuai Surat Edaran Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2022 diperuntukkan bagi sasaran Kepala KUA Kecamatan dan Penyuluh Agama PNS. Jumlah tenaga teknis keagamaan yang mendapat pelatihan penguatan moderasi beragama pada Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan serta Unit Pelaksana Teknis (14 Balai Diklat Keagamaan dan 2 Loka Diklat Keagamaan) berjumlah 4.615 orang, sedangkan target jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan berjumlah 16.258 orang. Sehingga, persentase Tenaga Teknis Keagamaan Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat mencapai 28,39%. Bila dibandingkan dengan target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan tersebut pada Perjanjian Kinerja sebesar 10,00%, maka capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2023 adalah sebesar 120,00%;
2. Cakupan Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama (PPMB) bagi tenaga teknis pendidikan sesuai Surat Edaran Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2022

diperuntukkan bagi sasaran Kepala Madrasah Negeri/Satuan Pendidikan Keagamaan Negeri dan Guru Pendidikan Agama PNS. Jumlah tenaga teknis pendidikan yang mendapat pelatihan penguatan moderasi beragama pada Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan serta Unit Pelaksana Teknis (14 Balai Diklat Keagamaan dan 2 Loka Diklat Keagamaan) berjumlah 6.635 orang, sedangkan target jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan berjumlah 37.998 orang. Sehingga, persentase Tenaga Teknis Keagamaan Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat mencapai 17,46%. Bila dibandingkan dengan target Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Perjanjian Kinerja sebesar 15,00%, maka capaian kinerja tahun 2023 adalah sebesar 116,41%.

3. Alumni Tenaga Administrasi Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang Moderat mencapai 4.241 orang. Apabila dibandingkan dengan target jumlah aparatur Kementerian Agama yang selesai mengikuti pelatihan berjumlah 16.274 orang, maka persentasenya sebesar 26,06%. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2023 (target 22,00%) adalah 118,45%.

IKU Alumni Pelatihan yang memenuhi standar

Alumni Pelatihan yang memenuhi standar, dari target tahun 2023 sebesar 80.000 orang terealisasi 279.684 orang atau tercapai 120%, apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 80.000 maka realisasi sudah melebihi target tahun 2023. Alumni yang memenuhi standar kompetensi sebanyak 279.684 orang tersebut terdiri dari: alumni pelatihan tenaga teknis keagamaan yang memenuhi standar kompetensi sebanyak 23.103 orang, alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan yang memenuhi standar kompetensi sebanyak 239.767 orang dan alumni tenaga administrasi yang memenuhi standar kompetensi sebanyak 16.814 orang. Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 350.000 orang maka akumulasi capaian alumni pelatihan yang memenuhi standar tahun 2023 sebesar 491.805 orang sudah tercapai bahkan melampaui target (120%), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18
Capaian Indikator Alumni Pelatihan yang memenuhi standar

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	50.000	60.000	70.000	80.000	350.000	Dari target Renstra 2024 sudah melampaui target
Realisasi	50.635	74.858	86.628	279.684		
%	101,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tingginya capaian alumni pelatihan ini dikarenakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama telah mengembangkan pelatihan berbasis *Massive Open Online Course* (MOOC),

melalui pelatihan berbasis MOOC ini pelatihan dapat menjangkau peserta yang lebih banyak.

IKU Persentase Capaian Standar Kompetensi Peserta Diklat

Indikator ini diukur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Nomor 67 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, peserta pelatihan dinyatakan lulus dengan kualifikasi “cukup kompeten” apabila memperoleh Nilai Akhir (NA) minimal **76,00**. Target persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan tahun 2023 adalah 87,00%, hasil pengukuran yang dilakukan oleh Pusdiklat rata-rata mencapai 88,17% sehingga capaiannya menjadi **101,34%**. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para alumni diklat seperti menerapkan program RTL atau rencana tindak lanjut bagi peserta diklat sesuai regulasi SK Kepala Badan Litbang dan Diklat Nomor 685 tahun 2018 tentang Juknis Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Rencana tindak lanjut merupakan implementasi hasil diklat yang dilakukan oleh peserta diklat di lingkungan kerjanya dan selanjutnya hasil RTL tersebut dinilai oleh Widyaiswara. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2024 sebesar 90% maka indikator tersebut masih kurang 1,83%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 19
Capaian Indikator Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat
Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	80%	82%	85%	87,00%	90%	Dari target Renstra 2024 belum tercapai (-1,83%)
Realisasi	90,5%	90,5%	95%	88,17%		
%	113	110,37	111,76	101,34	97,97	

Berdasarkan tabel diatas realisasi persentase capaian standar kompetensi peserta diklat tahun 2023 sebesar 88,17% tersebut diperoleh dari rerata persentase alumni pelatihan yang memenuhi standar kompetensi pada pelatihan tenaga teknis keagamaan (82,81%), pelatihan tenaga teknis Pendidikan (81,70%) dan pelatihan tenaga administrasi (100%), sebagai berikut:

1. Jumlah alumni pelatihan tenaga teknis keagamaan yang memenuhi standar kompetensi berjumlah 23.103 orang. Alumni pelatihan tenaga teknis Keagamaan secara keseluruhan baik tenaga teknis keagamaan eksternal/unsur masyarakat maupun ASN Kementerian Agama pada Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan maupun Unit Pelaksana Teknis (Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan) berjumlah 27.899 orang, sehingga persentasenya sebesar 82,81%.

2. Jumlah alumni pelatihan tenaga teknis pendidikan yang memenuhi standar kompetensi berjumlah 239.767 orang. Alumni pelatihan tenaga teknis Pendidikan secara keseluruhan baik tenaga teknis pendidikan eksternal/unsur masyarakat maupun ASN Kementerian Agama pada Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan maupun Unit Pelaksana Teknis (Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan) berjumlah 293.482 orang, sehingga persentasenya sebesar 81,70%.
3. Jumlah alumni pelatihan tenaga administrasi yang memenuhi standar kompetensi berjumlah 16.814 orang. Alumni pelatihan tenaga administrasi secara keseluruhan pada Pusdiklat Tenaga Administrasi maupun Unit Pelaksana Teknis (Balai Diklat Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan) berjumlah 16.814 orang, sehingga persentasenya sebesar 100%.

IKU Indeks Pemanfaatan Alumni Diklat dan Hasil Pelatihan

Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan adalah indeks yang menggambarkan sejauhmana alumni diklat memberdayakan ilmu/kompetensi yang diperoleh kepada lingkungan sekitar dan sejauhmana alumni diklat diberdayakan oleh pimpinannya. Hasil survey tahun 2023 menunjukkan bahwa kinerja pemberdayaan alumni diklat dalam penilaian dari target 85,80 tercapai 94,35 sehingga capaiannya 109,96%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2024 sebesar 86,00 maka indikator tersebut sudah tercapai bahkan melampaui target (109,71%), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20
Capaian Indikator Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan
2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	85,20	85,40	85,60	85,80	86,00	Sudah tercapai target Renstra 2024 (+8,35)
Realisasi	84,44	85,5	89,66	94,35		
%	99	100,12	104,74	109,96	109,71	

Indeks Pemanfaatan alumni diklat dan hasil pelatihan tersebut sebesar 94,35 diperoleh dari rerata indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis keagamaan (100), indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis Pendidikan (94,29), dan indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga administrasi (88,75), sebagaimana berikut:

1. Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga administrasi diperoleh 88,75, dilakukan melalui survei pada kegiatan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) yang dilaksanakan di seluruh Provinsi di Indonesia.
2. Penguatan Moderasi Beragama merupakan salah satu program prioritas Menteri Agama. Pada tahun 2021, alumni ToT Penguatan Moderasi Beragama berjumlah 148

orang sedangkan alumni pelatihan Instruktur Nasional Penguatan Moderasi Beragama berjumlah 34 orang. Alumni ToT terdiri dari Widyaiswara dan Dosen para Perguruan Tinggi Keagamaan. Widyaiswara dan Dosen tersebut diberdayakan sebagai fasilitator penguatan moderasi beragama baik berupa Sosialisasi/Orientasi Pelopor/Pelatihan Penggerak Penguatan Moderasi Beragama yang diselenggarakan oleh seluruh Satuan Kerja di Kementerian Agama. Disamping itu, Dosen alumni ToT diberdayakan sebagai pengurus Rumah Moderasi Beragama (RMB) pada Perguruan Tinggi Keagamaan masing-masing. Dengan demikian, Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis keagamaan adalah sebesar 100,00.

3. Kemandirian Pesantren merupakan salah satu program prioritas Menteri Agama. Sebelum mendapatkan bantuan dana inkubasi bisnis kemandirian pesantren, mereka diharuskan mengikuti dan lulus pelatihan kemandirian pesantren. Dari 105 orang yang mengikuti pelatihan kemandirian pesantren pada tahun 2021, semuanya lolos seleksi untuk mendapatkan bantuan dana inkubasi bisnis kemandirian pesantren. Berdasarkan hasil pendampingan dan monitoring, 99 pesantren sudah berhasil menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan bisnis. Dengan demikian, Indeks pemanfaatan hasil pelatihan tenaga teknis Pendidikan adalah sebesar 94,29.

IKU Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO

Untuk menjaga mutu Diklat Badan Litbang dan Diklat melakukan akreditasi Internasional untuk Quality Management System - Requirements atau SNI ISO 9001:2015. Tahun 2023, dari 13 satuan kerja yang ditargetkan, terealisasi 9 satuan kerja yang berhasil memperoleh sertifikat SNI ISO 9001:2015, sehingga realisasinya **69,23%**, yaitu Satuan Kerja Badan Litbang dan Diklat (Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan), Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Balai Diklat Keagamaan Semarang, Balai Diklat Keagamaan Jakarta, Balai Diklat Keagamaan Makassar, Balai Diklat Keagamaan Bandung, Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Balai Diklat Keagamaan Palembang dan Balai Litbang Agama Semarang. Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 100% maka masih ada selisih kekurangan sebesar 30,77%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 21

Capaian Indikator Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	12,5%	25%	50%	75,00%	100%	Dari target Renstra 2024, masih terdapat kekurangan (-30,77%)
Realisasi	-	26,6%	38,46%	69,23%		
%	-	106,68	76,92	92,31	69,23	



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BDK Semarang



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BDK Surabaya



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BDK Jakarta



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BDK Makassar



Sertifikat SNI ISO 9001:2015



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BDK Palembang



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BDK Bandung



Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BDK Denpasar

Gambar 13
sertifikat SNI ISO 90001:2015 pada Satuan Kerja di Badan Litbang dan Diklat

Analisis

Kinerja kediklatan tahun 2023 sudah tercapai dan sangat baik. Upaya pembelajaran melalui pembelajaran/pelatihan jarak-jauh terus ditingkatkan dan dikembangkan, sehingga pendidikan di area kediklatan dapat terus terselenggarakan dengan baik. Balitbangdiklat telah menerapkan sistem ini di 14 Balai Diklat Keagamaan, 2 Loka Diklat Keagamaan dan 2 Pusdiklat, bahkan pada Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan sejak tahun 2022 telah dikembangkan dan dilakukan implementasi pelatihan berbasis MOOC. Total alumni tercapai sesuai target Renstra/ Perkin dan capaian kualitas alumni juga tercapai. Balitbangdiklat menerapkan sistem penjaminan mutu untuk para lulusan dengan adanya ujian atau RTL (Rencana Tindak Lanjut). Tingkat kepuasan alumni diklat atas pelayanan diklat juga sangat tinggi sehingga mendorong para alumni diklat berminat kembali mengikuti diklat.

Jika merujuk pada PP 17/2020 terkait kebutuhan PNS memperoleh pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensinya ini sudah sangat memungkinkan dicapai dengan dikembangkannya pelatihan berbasis MOOC. Total PNS Kementerian Agama adalah 261.907 pegawai (Data Simpeg Kementerian Agama 2023). Strategi perbaikan yang harus dilakukan adalah menerapkan pembelajaran terintegrasi yang disebut *Corporate University*, pembangunan manajemen *talent pool*, dan dengan memperkuat pengembangan pelatihan berbasis *Massive Open Online Course* (MOOC).

A.3. Capaian Kinerja Sasaran Program III. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2023, indikator kinerja pada sasaran program meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan dan pengkajian al-Qur'an serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan, dipresentasikan dalam 5 (lima) IKU, yakni Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an, Tingkat Viewer yang memanfaatkan layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama, Tingkat Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an, dan Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 22.

Capaian Kinerja Sasaran Program Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan (Area Pelayanan Publik) Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas layanan pentashihan,	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85,60	90,05	105,20%

pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85,60	86,50	101,05%
	Tingkat Viewer yang memanfaatkan layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama	260.000	673.451	120,00%
	Tingkat Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	75.000	178.065	120%
	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	77,00	88,40	114,81%
Rerata Capaian Kinerja				112,21 %

“Secara keseluruhan capaian kinerja area pelayanan publik adalah 112,21% berada pada area Sangat Baik”

IKU Indeks Kepuasan Layanan Pentashihan Mushaf Al-Quran

Indeks kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an, dari target tahun 2023 sebesar 85,60 terealisasi 90,05 atau capaian kinerja 105,20%.

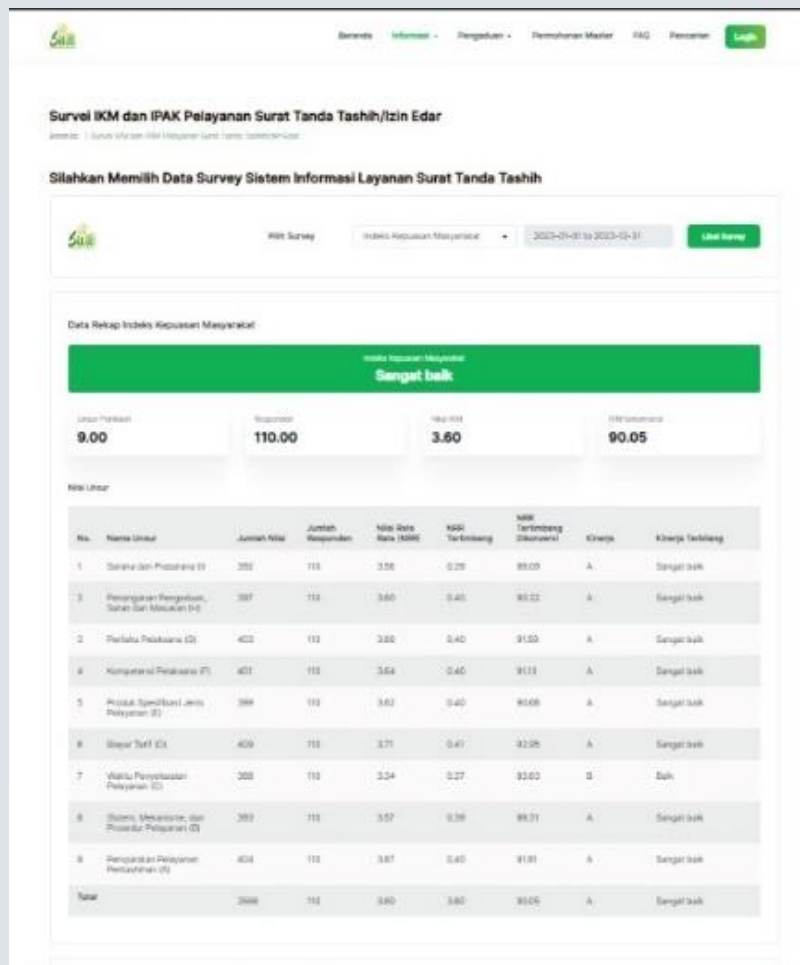
Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 85,80 maka indikator tersebut sudah tercapai bahkan melampaui target (104,95%), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Pentashihan Mushaf Al-Quran
Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	85	85,20	85,40	85,60	85,80	Sudah melampaui target Renstra 2024 (+4,25)
Realisasi	76,74	82,01	84,67	90,05		
%	90,3	96,26	99,15	105,20	104,95	

Pada tahun 2023, Survey Indeks kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an dilakukan terhadap 110 responden yang merupakan pengguna layanan aplikasi tashih online. Dari survey tersebut diperoleh tingkat IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 90,05. Indeks ini menggambarkan seberapa masyarakat/ penerbit puas atas layanan pentashihan. Instrumen survey mengacu pada Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan.

<https://tashih.kemenag.go.id/hasil-survey>



Gambar 14
Hasil IKM Pentashihan Tahun 2023

IKU Indeks Kepuasan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an

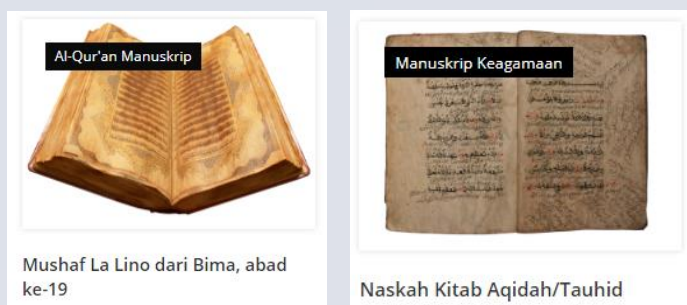
Indeks kepuasan layanan museum bayt al-Qur'an, dari target tahun 2023 sebesar 85,60 terealisasi 86,50 atau capaian kinerja 101,01%.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 85,80 maka indikator tersebut sudah tercapai bahkan melampaui target (100,82%), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	85	85,2	85,4	85,60	85,80	Sudah melampaui target Renstra 2024 (+0,70)
Realisasi	89,8	85,92	87,09	86,50		
%	105	100,85	101,98	101,05	100,82	

Survey ini menggambarkan kepuasan atas Layanan Museum Bayt Al-Qur'an dimana instrumen merujuk pada standar pelayanan Permenpan No.15 Tahun 2014. Hasil pengukuran Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tahun 2023 diperoleh indeks 86,50. Hal yang perlu diperbaiki adalah pengaduan layanan. Untuk meningkatkan layanan ini berbagai upaya dilakukan seperti pendaftaran dan prosedur layanan dapat dilakukan secara IT melalui: <https://bqmi.kemenag.go.id/>



Gambar 15
Produk Museum Bayt Al-Qur'an

IKU Tingkat Viewer terhadap Layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama

Tingkat *viewer* yang memanfaatkan layanan al-Qur'an digital Kementerian Agama, dari target tahun 2023 sebesar 260.000 terealisasi 673.451 atau tercapai 120%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 1.250.000 *viewer* maka capaian akumulasi indikator ini sampai dengan tahun 2023 sebesar 1.944.917 *viewer* sudah tercapai bahkan melampau target (120,00%). Nilai ini merupakan akumulasi realisasi tahun 2020 – 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 25
Capaian Indikator Tingkat Viewer terhadap Layanan Digital Al-Qur'an Kementerian Agama Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	230.000	240.000	250.000	260.000	1.250.000	Capaian akumulasi 1.944.917 <i>viewer</i> , sudah melampau target Renstra 2024 (+694.917 <i>viewer</i>)
Realisasi	491.432	662.451	609.015	67.3451		
%	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Tahun 2023 hingga triwulan ke-IV terdapat 673.451 masyarakat/penerbit yang memanfaatkan hasil kajian Al-Qur'an melalui aplikasi-aplikasi dan media sosial yang dikembangkan oleh LPMQ, diantaranya aplikasi pustaka lajnah, E-Pub (digunakan mitra netra), You Tube (Film-film kajian Al-Qur'an), Aplikasi Qur'an Kemeng, Qur'an in Word, Qur'an Android, dan lain-lain.

<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>.

https://www.youtube.com/results?search_query=lpmq

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kajian yang dilakukan LPMQ, salah satunya kegiatan diseminasi. Bertema "Penguatan Literasi Al-Qur'an dalam Bingkai Moderasi Beragama" telah terselenggara sembilan kali diantaranya diantaranya berkerjasama dengan Yayasan Pendidikan Al-Muhajirin, UIN Abdurrahman Wahid, UIN Raden Fatah Palembang, Masjid Sheikh Zayed Solo, UIN Jogja, Markas Qiraat Indonesia, Ponpes Al-Ihsan wa Taqwa, dan pada MTQ Jambi.

<https://www.instagram.com/reel/CsU0im1PNfE/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng==>



Gambar 16.

Foto Kegiatan Diseminasi di Masjid Raya Syeikh Zayed Solo, Tahun 2023



Gambar 17

Aplikasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2023

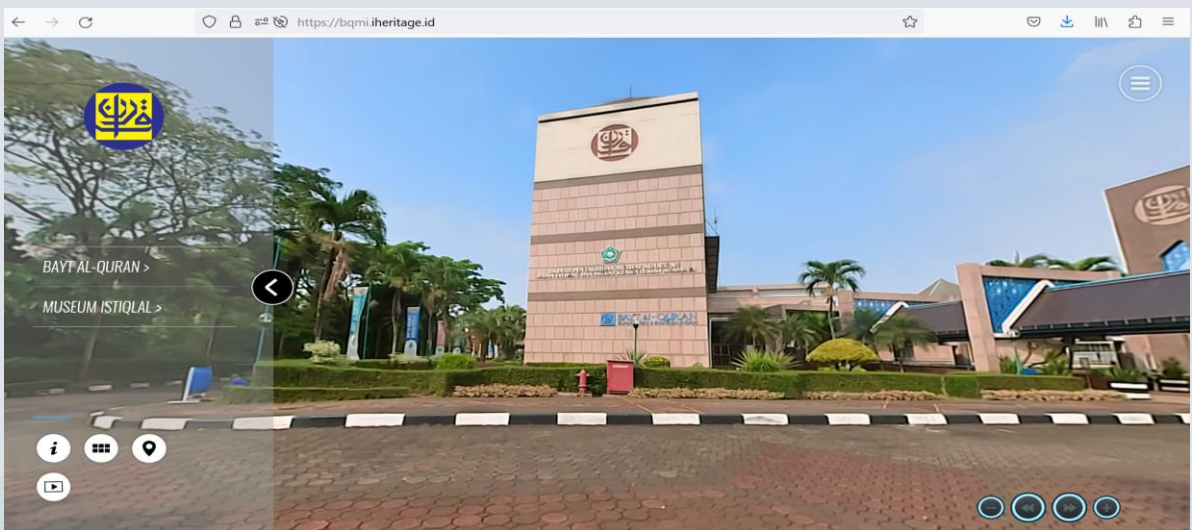
Tahun 2023 LPMQ mencetak beberapa buku dan Mushaf Al-Quran, diantaranya yaitu Buku Master Yasin 1.000 eks, Kamus Kosa Isyarat Keislaman 2.000 eks, Mushaf Al-Qur'an Isep Misbah 1.000 eks, Juz Amma PDSRW (metode tilawah) 3.000 eks, Pedoman Membaca Al-Qur'an Braille 1.000 eks, Penerbitan Mushaf Isyarat Juz 16 - 30 Juz 1.000 eks, Panduan Membaca Al-Qur'an Braille Iqrana 500 eks, Pedoman Membaca Al-Qur'an Isyarat bagi PDSRW 1.000 eks, Penerbitan Mushaf Al-Qur'an Isyarat Juz 1 - 15 1.000 eks, dan Penerbitan Braille 30 Juz 100 eks.

IKU Pengunjung Yang Memanfaatkan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an

Target pengunjung Bayt Al-Qur'an pada tahun 2023 sebanyak 75.000 pengunjung, dengan pengunjung BQMI pada tahun ini mencapai 178.065 (pengunjung offline dan online) atau capaian kinerja 120%. Hal ini dapat tercapai dengan adanya beberapa metode pameran, kunjungan virtual pada virtual tour BQMI, dan kunjungan website maupun medsos BQMI dan perpustakaan Lajnah. Museum virtual BQMI dapat diakses melalui alamat: <https://bqmi.iheritage.id/>



Gambar 18
Foto Pelayanan Museum Bayt Al-Qur'an



Gambar 19
Tampilan Museum Virtual Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal

Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2024 sebesar 350.000 orang pengunjung, maka akumulasi capaian tahun 2023 sebanyak 307.362 orang (87,82%) masih terdapat kekurangan 42.638 orang pengunjung, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 26
Capaian Indikator Pengunjung Yang Memanfaatkan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	60.000	65.000	70.000	75.000	350.000	Akumulasi capaian 307.362 orang, belum mencapai target Renstra 2024 (-42.638 orang)
Realisasi	23.971	27.823	77.503	178.065		
%	40,00	42,80	110,72	120,00	87,82	

IKU Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan

Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat/ penerbit atas layanan dalam penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Layanan ini diukur mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam aturan tersebut memiliki 9 dimensi yang diukur, tetapi dalam indikator ini hanya menggunakan 5 dimensi, yaitu: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, produk layanan, system aplikasi pelayanan (*on-line*), dan kompetensi pemberi layanan. Berbagai buku pendidikan agama dan keagamaan wajib memperoleh izin edar untuk menjaga kualitas buku dan kesesuaian buku dengan substansinya. Oleh karena itu maka pelayanan publik ini wajib hadir sebagai bagian tugas negara. Pelayanan publik ini merupakan amanat PMA No.9 Tahun 2018 tentang Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Awalnya pada tahun 2019 sejak terbit regulasi tersebut dimulai layanan publik ini masih berbasis manual. Namun sejak tahun 2020, layanan publik ini sudah berbasis IT dimana masyarakat/penerbit mengajukan proses layanan sudah berbasis IT.

Berdasarkan hasil survey tahun 2023, indeks layanan ini diperoleh skor 88,40 dalam skala 100 yang berarti responden mempunyai cenderung puas atas layanan buku ini. Sehingga dari target tahun 2023 sebesar 77,00 capaian nya 114,81%

Hal ini berdasarkan dari aspek prosedur pelayanan mendapatkan skor 92,5% (sangat baik), waktu penyelesaian 86,6% (baik), produk layanan 87,5% (baik), sistem aplikasi pelayanan

87,3% (baik), dan kompetensi pemberi layanan 88,3% (baik). Dalam Penilaian Buku Pendidikan Agama Buku yang dinilai berjumlah 723 buku dan menghasilkan buku layak terbit sejumlah 486 buku (67% dari 723 buku).

Tabel 27
Hasil Survey Kepuasan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun 2023

DIMENSI	SKOR	KATEGORI
Prosedur Pelayanan	92,5	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	86,6	Baik
Produk Layanan	87,5	Baik
Sistem Aplikasi Pelayanan	87,3	Baik
Kompetensi Pemberi Layanan	88,3	Baik
IKM	88,4	Sangat Baik

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 79,00 maka capaian indikator ini sudah tercapai bahkan melampaui target (111,90%), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 28
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	70,00	72,00	75,00	77,00	79,00	Sudah melampaui target Renstra 2024 (+5,40)
Realisasi	73,54	84,40	88,80	88,40		
%	105	117,22	118,40	114,81	111,90	

Analisis

IKU ini menggambarkan kinerja pelayanan publik Balitbangdiklat yaitu pelayanan tashih, pemanduan museum dan juga pelayanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Selain IKU tersebut terdapat jumlah kunjungan museum dan pemanfaatan hasil kajian al-Qur'an android dan al-Qur'an in word.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja "sangat baik" artinya masyarakat yang memperoleh layanan publik Balitbangdiklat "puas". Meskipun demikian peningkatan

pelayanan pentashihan perlu perbaikan terutama waktu layanan. Tahun 2023, Lajnah sebagai UPT Balitbangdiklat yang menangani pelayanan ini melakukan penambahan jumlah tenaga pentashih, penguatan SDM pentashih, pengembangan jabatan fungsional pengembang tafsir, serta memperbaiki layanan digital pendaftaran pentashihan. Terkait jumlah pengunjung museum bayt Al-Qur'an, tahun 2023 telah dibangun layanan museum digital, dan perbaikan peningkatan pelayanan melalui renovasi Gedung museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal. Pada penilaian buku agama, perlu penguatan layanan dan perlu perbaikan SOP terutama di waktu pelayanan.

A.4. Capaian Kinerja Sasaran Program IV. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel

Pada Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2023, indikator kinerja pada sasaran program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, dipresentasikan dalam 5 (lima) IKU, yakni Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan, Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Nilai Maturitas SPIP, dan Indeks Profesionalitas ASN. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada sasaran program ini dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 29
Capaian Perjanjian Kinerja Area Dukungan Manajemen
Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	75,00%	57,72%	76,96%
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	84,00	-	-
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82,00	82,85	101,04%
	Nilai Maturitas SPIP	3,10	3,20	103,23%
	Indeks Profesionalitas ASN	78,00	78,00	100,00%
Rerata Capaian Kinerja				95,31%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area dukungan manajemen adalah 95,31% berada pada area sangat baik”

IKU Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan

Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan, dari target tahun 2023 sebesar 75,00% terealisasi 57,72% atau capaian kinerja 76,96% (belum tercapai).

Total Temuan Badan Litbang Hasil Audit BPK RI sebesar Rp858.514.000,- masih memiliki saldo sebesar Rp.377.984.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1) Temuan Beasiswa Pusdiklat Administrasi sebesar Rp674.400.000, sudah di tindaklanjuti sebesar Rp349.800.000,- 2) Temuan Kelebihan Tunjangan Kinerja Penerima Beasiswa Tahun 2016 sebesar Rp142.864.000,- sudah ditindaklanjuti sebesar Rp95.030.000,- 3) Kelebihan Tunjangan Fungsional Penerima Beasiswa Tahun 2018 sebesar Rp41.250.000,- sudah ditindaklanjuti sebesar Rp35.700.000,- sedangkan total temuan hasil audit Itjen sebesar Rp242.189.490 masih memiliki saldo sebesar Rp87.379.672,- dengan rincian: 1) Temuan Puslitbang Kehidupan Keagamaan/Puslitbang Bimas Agama Tahun 2015 sebesar Rp150.918.00,- sudah ditindaklanjuti Rp150.918.000,- 2) Temuan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Tahun 2017 sebesar Rp16.135.274, sudah ditindaklanjuti sebesar Rp3.891.818 3) Temuan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Tahun 2022 sebesar Rp1,348,000,- sudah ditindaklanjuti sebesar Rp1.348.000;- 4) Temuan Pusdiklat Tenaga Teknis Tahun 2022 sebesar Rp75.000.00,- dan sampai akhir tahun 2023 belum ditindaklanjuti.

Apabila dibandingkan dengan target Renstra tahun 2024 sebesar 85,80 maka indikator tersebut masih belum tercapai, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 30
Capaian Indikator Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan
Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	60%	65%	70%	75,00%	80,00%	Dari target Renstra 2024, belum tercapai (- 22,28%)
Realisasi	48%	49,72%	50%	57,72%		
%	80	76,49	71,43	76,96	72,15	

IKU Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-2274/SJ.B-IV/OT.003/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi yang menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan, sehingga mulai **tahun 2023 tidak lagi dilakukan kegiatan penilaian PMPRB** baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat Unit Eselon I Kementerian Agama. Adapun capaian Nilai PMPRB 2020-2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 31
Capaian Indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	83,10	83,50	83,75	84	84,25	Sejak Tahun 2023 Kebijakan KemenpanRB tidak dilakukan penilaian PMPRB
Realisasi	83,40	83,54	83,52	-	-	
%	100	100,05	99,73	-	-	

IKU Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, untuk capaian kinerja SAKIP Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mengalami kenaikan dari tahun 2015 adalah (54,47), 2016 adalah (71,80), 2017 adalah (75,10), tahun 2018 adalah (80,49), tahun 2019 adalah (81,06), tahun 2020 (83,11), tahun 2021 adalah (83,17), tahun 2022 adalah (82,40) dan **tahun 2023 adalah (82,85)**. Capaian tahun 2023 ini dari target 82,00 tercapai 101,04% dengan mendapat kategori **MEMUASKAN (A)**, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 32
Rincian Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun 2023

No	Uraian	Bobot	Nilai	%
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60	82,00%
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,30	81,00%
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,45	83,00%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,50	86,00%
Jumlah		100,00	82,85	82,85

Apabila dibandingkan dengan target Renstra 2024 yaitu 82,5 maka capaian IKU ini tahun 2023 sudah tercapai bahkan melampaui target(100,42%), sebagaimana tabel berikut:



Tabel 33

Capaian Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	81,10	82,00	81,50	82,00	82,50	Sudah melampaui target Renstra 2024 (+0,35)
Realisasi	83,11	83,17	82,40	82,85		
%	102	101,43	101,10	101,04	100,42	

IKU Nilai Maturitas SPIP

Nilai Maturitas SPIP berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tahun 2023 adalah 3,202 (berkembang) dengan target 3,10 atau capaian kinerja 103,23%. Maturitas tersebut adalah Organisasi telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun Organisasi belum menyusun strategi penapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. *Evidence* pencapaian nilai ini dapat dilihat pada *link* berikut: <https://kemenag.go.id/nasional/naik-ke-level-3-bkpk-nilai-maturitas-sistem-pengendalian-internal-kemenag-baik-uzUcs>

Apabila dibandingkan dengan target tujuan renstra tahun 2024 yaitu 3,15 maka capaian IKU tahun 2023 sudah tercapai bahkan melampaui target (101,59%), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 34

Capaian Indikator Nilai Maturitas SPIP
Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	2,90	3,00	3,05	3,10	3,15	Sudah melampaui target Renstra 2024 (+0,5)
Realisasi	3,28	2,82	3,09	3,20		
%	113	94,03	101,32	103,23	101,59	

IKU Indeks Profesionalisme ASN

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, melalui Biro Kepegawian melaksanakan Indeks Profesionalitas dan Moderasi Beragama (IPMB) bagi ASN seluruh pegawai Kementerian Agama, secara keseluruhan Indeks Profesionalisme ASN Badan Litbang dan Diklat tahun 2023 adalah 78,00 dalam kriteria “sedang”. Sehingga capaian nya 100% dari target tahun 2023 sebesar 78,00.

Apabila dibandingkan target Renstra 2024 yaitu 79,00 maka capaian IKU ini tahun 2023 adalah 98,73% atau masih kurang (-1,0), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 35
Capaian Indikator Indeks Profesionalisme ASN
Tahun 2020-2023

Uraian	Tahun					Keterangan
	2020	2021	2022	2023	2024	
Target	75	76,00	77,00	78,00	79,00	Belum mencapai target Renstra 2024 (-1,00)
Realisasi	73,03	76,60	72,88	78,00		
%	97	100,79	94,65	100	98,73	

“Seberapa profesionalkah pegawai Badan Litbang dan Diklat. Suatu ukuran yang disebut indeks profesionalisme ASN digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme ASN. Merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, indeks ini diukur oleh 4 (empat) dimensi yaitu kualifikasi (pendidikan formal), kompetensi (pengembangan kompetensi/ pelatihan/ workshop), kinerja (nilai SKP), dan disiplin. Hasil pengukuran menunjukkan Indeks Profesionalisme ASN Tahun 2023 = 78,00”



Dari hasil survey tersebut perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan terhadap beberapa temuan empiris yaitu:

1. Pejabat struktural yang belum mengikuti pelatihan kepemimpinan sesuai jenjang jabatan struktural yang didudukinya;
2. Pejabat fungsional yang belum mengikuti pelatihan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan yang didudukinya;
3. ASN (pejabat struktural/fungsional/pelaksana) yang belum mengikuti pelatihan teknis sejumlah minimal 20 JP dalam 1 tahun terakhir;
4. ASN (pejabat struktural/fungsional/pelaksana) yang belum mengikuti pengembangan kompetensi berupa seminar/workshop/kursus/magang/sejenis dalam 2 tahun terakhir.

Analisis

Secara keseluruhan kinerja area dukungan manajemen berpredikat baik yaitu mencapai 95,31%. area yang masih perlu perbaikan adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP). Sedangkan area yang sudah menunjukkan hasil diatas 100% adalah nilai SAKIP dan SPIP. Rekomendasi perbaikan adalah:

Koordinasi dan pemetaan temuan dengan Sekretariat Jenderal dan pihak terkait, pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, penurunan atau casecading IKU organisasi menjadi SKP Pegawai, serta sosialisasi masif program RB/ZI Balitbangdiklat ke seluruh *stakeholders*, pengembangan dan penguatan implementasi IT dalam proses kerja dan monev serta pelibatan seluruh pegawai dalam RB/ZI,

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Anggaran Akhir Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2023 adalah sebesar Rp630.434.054.000,- (*enam ratus tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh empat juta lima puluh empat ribu rupiah*). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusediklat, dan Sekretariat Badan) dan 19 satker daerah (14 BDK, 3 BLA, 2 LDK dan LPMQ).

Realisasikan anggaran tahun 2023 sebesar Rp626.118.996.972,- (*enam ratus dua puluh enam miliar seratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau sudah terserap sebesar **99,32% (sangat baik)**, nilai ini lebih baik dari tahun 2022 yang terserap 98,47%, nilai ini lebih baik dari tahun 2020 dan sedikit penurunan dari tahun 2021 dimana serapan anggaran tahun 2021 adalah 99,64% dan tahun 2020 serapan anggaran adalah 97,29%. Realisasi Anggaran Tahun 2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36

Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Unit/Satuan Kerja
Data omSPAN Per-22 Januari 2023

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	BLA Makassar	14.529.441.000	14.526.264.647	99,98	3.176.353
2	BLA Jakarta	11.096.912.000	11.083.726.530	99,88	13.185.470
3	BLA Semarang	14.570.328.000	14.551.799.376	99,87	18.528.624
4	BDK Manado	22.684.245.000	22.643.102.122	99,82	41.142.878
5	BDK Palembang	28.670.442.000	28.603.890.921	99,77	66.551.079
6	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	30.321.312.000	30.244.538.768	99,75	76.773.232
7	BDK Jakarta	25.241.024.000	25.165.664.729	99,70	75.359.271
8	BDK Medan	26.524.679.000	26.443.603.085	99,69	81.075.915
9	BDK Surabaya	33.961.063.000	33.852.988.855	99,68	108.074.145
10	BDK Padang	25.157.352.000	25.055.811.078	99,60	101.540.922
11	BDK Semarang	32.169.031.000	32.037.226.349	99,59	131.804.651

12	BDK Makassar	30.587.586.000	30.442.197.049	99,52	145.388.951
13	BDK Banjarmasin	22.154.163.000	22.047.397.249	99,52	106.765.751
14	BDK Papua	18.626.807.000	18.530.025.096	99,48	96.781.904
15	Loka Diklat Lampung	9.460.831.000	9.409.027.658	99,45	51.803.342
16	BDK Ambon	24.110.704.000	23.963.855.289	99,39	146.848.711
17	BDK Aceh	23.954.113.000	23.765.653.736	99,21	188.459.264
18	BDK Denpasar	24.607.703.000	24.404.724.041	99,18	202.978.959
19	Satker Balitbangdiklat (Satker Pusat)	171.217.296.000	169.666.978.905	99,09	1.550.317.095
20	BDK Bandung	30.527.217.000	29.714.565.269	97,34	812.651.731
21	Loka Diklat Pekanbaru	10.261.805.000	9.965.956.220	97,12	295.848.780
Total		630.434.054.000	626.118.996.972	99,32	4.315.057.028

Tabel 37

Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana
Data omSPAN Per-22 Januari 2024

No	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Rupiah Murni (RM)	629.803.334.000	625.488.633.554	99,31	4.314.700.446
2	PNBP	630.720.000	630.363.418	99,94	356.582
Total		630.434.054.000	626.118.996.972	99,32	4.315.057.028

Tabel 38

Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Jenis Belanja
Data omSPAN Per-22 Januari 2024

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Belanja Pegawai	629.803.334.000	625.488.633.554	99,31	4.314.700.446
2	Belanja Barang	630.720.000	630.363.418	99,94	356.582
3	Belanja Modal	629.803.334.000	625.488.633.554	99,31	4.314.700.446
Total		630.434.054.000	626.118.996.972	99,32	4.315.057.028

Tabel 39

Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Fungsi
Data omSPAN Per-22 Januari 2024

No	Fungsi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Agama	400.502.344.000	394.570.510.391	98,52	5.931.833.609
2	Pendidikan	169.725.670.000	166.931.031.211	98,35	2.794.638.789
Total		630.434.054.000	626.118.996.972	99,32	4.315.057.028



Tabel 40
 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Kegiatan
 Data omSPAN Per-22 Januari 2024

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	13.577.092.000	13.530.031.942	99,65	47.060.058
2	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi	69.925.918.000	69.470.951.732	99,35	454.966.268
3	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan	42.750.568.000	42.430.397.557	99,25	320.170.443
4	Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan	20.713.264.000	20.479.885.003	98,87	233.378.997
5	Penelitian dan Pengembangan Lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi	7.497.366.000	7.468.063.633	99,61	29.302.367
6	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan	27.641.387.000	27.630.558.078	99,96	10.828.922
7	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat	279.314.151.000	277.789.921.965	99,45	1.524.229.035
8	Pendidikan dan Pelatihan Administrasi di Lembaga Pendidikan	26.783.938.000	26.408.331.908	98,60	375.606.092



9	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan	130.468.368.000	129.279.261.340	99,09	1.189.106.660
10	Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Pendidikan Keagamaan	11.762.002.000	11.631.593.814	98,89	130.408.186
Total		630.434.054.000	626.118.996.972	99,32	4.315.057.028

Tabel 41
Realisasi Anggaran Tahun 2023 Berdasarkan Kewenangan
Data omSPAN Per-22 Januari 2024

No	Kewenangan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Pusat	171.217.296.000	169.666.978.905	99,09	1.550.317.095
2	Daerah	459.216.758.000	456.452.018.067	99,40	2.764.739.933
Total		630.434.054.000	626.118.996.972	99,32	4.315.057.028

Realisasi Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2023, berdasarkan data OmSPAN pe-22 Januari 2024 berada pada peringkat ke-3 diantara Unit Eselon I Kementerian Agama, sebagaimana tabel berikut:

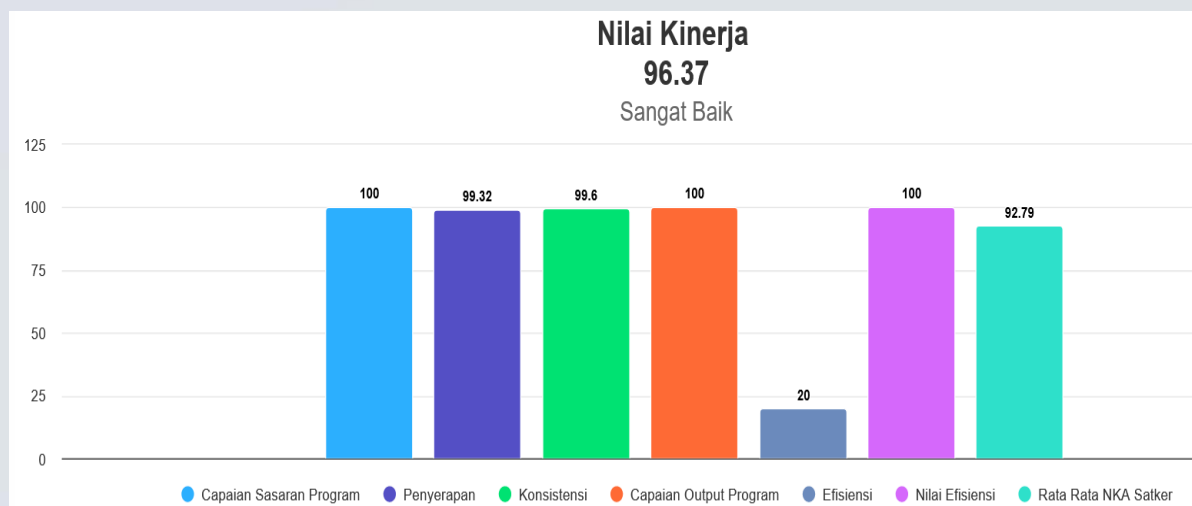
Tabel 42
Realisasi Anggaran Tahun 2023 Unit Eselon I Kementerian Agama
Data omSPAN Per-22 Januari 2024

No	Unit Eselon I	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	Ditjen Bimas Buddha	194.101.459.000	193.587.810.055	99,74	513.648.945
2	Inspektorat Jenderal	168.453.626.000	168.004.422.339	99,73	449.203.661
3	Balitbangdiklat	630.434.054.000	626.118.996.972	99,32	4.315.057.028
4	BPJPH	340.608.411.000	336.563.109.068	98,81	4.045.301.932
5	Ditjen Bimas Hindu	456.250.246.000	450.364.274.932	98,71	5.885.971.068
6	Sekretariat Jenderal	31.385.940.983.000	30.978.425.105.063	98,70	407.515.877.937
7	Ditjen PHU	1.372.706.235.000	1.352.863.679.254	98,55	19.842.555.746
8	Ditjen Pendidikan Islam	36.442.378.999.000	35.608.744.432.147	97,71	833.634.566.853
9	Ditjen Bimas Kristen	785.853.484.000	763.117.717.243	97,11	22.735.766.757
10	Ditjen Bimas Katolik	313.991.672.000	297.906.625.293	94,88	16.085.046.707

11	Ditjen Bimas Islam	2.213.275.466.000	2.005.103.817.342	90,59	208.171.648.658
Total		74.303.994.635.000	72.780.799.989.708	97,95	1.523.194.645.292

Selain realisasi anggaran yang sangat baik, untuk mengukur akuntabilitas kinerja, Kementerian Keuangan telah merumuskan Nilai Kinerja Anggaran yang terdiri dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) menggambarkan kualitas kinerja anggaran yang dilaksanakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yang terdiri dari aspek capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, capaian sasaran program dan rata-rata nilai satuan kerja. Nilai ini diperoleh melalui aplikasi SMART DJA Kemenkeu (<https://money.kemenkeu.go.id>).

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2023 berdasarkan data aplikasi Sistem Monitoring AnggaRan Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan, berdasarkan data per-22 Januari 2024 memperoleh nilai **96,37** berada pada peringkat kedua di antara seluruh unit eselon I pada Kementerian Agama, sedikit di bawah ITJEN Kemenag yang memperoleh **97,56** atau selisih **1,19**. Secara grafik dapat dilihat pada gambar berikut:



Grafik 5
Grafik Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023 pada Unit Eselon I Kementerian Agama, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 43

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Unit Eselon I Kementerian Agama Tahun 2023
Urut Berdasarkan Peringkat Nilai Kinerja

No	Unit Eselon I	Kinerja	CSP	Penyerapan	Konsistensi	CKP	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Rata-Rata Nilai Satker
1	Inspektorat Jenderal	97,56	100	99,73	99,37	100	0,27	50,675	99,86
2	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan	96,37	100	99,32	99,6	100	20	100	92,79
3	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	94,35	100	98,81	69,55	100	17,44	93,6	91,2
4	Ditjen Pendidikan Islam	93,17	100	97,63	91,12	100	13,47	83,675	88,51
5	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	92,71	100	90,57	91,11	100	9,43	73,575	88,79
6	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik	92,04	100	94,88	96,91	100	15,87	89,675	85,41
7	Sekretariat Jenderal	91,99	99,5	98,7	97,43	100	10,87	77.175	86,68
8	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	91,32	100	99,74	98,25	100	5,23	63,075	86,28
9	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	91,07	100	97,10	96,96	100	9,03	72,575	85,03
10	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu	90,93	100	98,71	97,81	100	3,5	58,75	85,97
11	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	90,45	100	98,55	85,05	100	0,74	51,85	86,43

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023 pada Satuan Kerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 44

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Tahun 2023
Urut Berdasarkan Peringkat Nilai Kinerja

No	Satuan Kerja	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	BLA Semarang	99,99	99,87	99,99	100,00	20,00	100,00
2	BLA Jakarta	99,94	99,88	99,74	100,00	20,00	100,00
3	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	99,86	99,75	99,36	100,00	20,00	100,00
4	BLA Makassar	99,75	99,98	100,00	100,00	19,66	99,14
5	BDK Surabaya	97,28	99,68	99,97	100,00	16,24	90,60
6	BDK Palembang	96,94	99,77	99,76	100,00	15,81	89,52
7	Badan Litbang dan Diklat (Satker Pusat)	96,40	99,09	99,92	100,00	15,11	87,77
8	BDK Jakarta	93,70	99,70	99,98	100,00	11,24	78,09
9	BDK Bandung	93,68	97,34	98,92	100,00	11,80	79,50
10	Loka Diklat Pekanbaru	93,65	97,12	99,75	100,00	11,57	78,92
11	BDK Medan	93,05	99,69	99,65	100,00	10,41	76,03
12	BDK Makassar	92,64	99,52	98,28	100,00	10,21	75,53
13	BDK Denpasar	90,64	99,18	96,10	100,00	8,01	70,03
14	BDK Ambon	90,22	99,39	99,95	100,00	6,41	66,03
15	BDK Semarang	89,10	99,59	99,28	100,00	4,99	62,48
16	BDK Papua	89,02	99,48	99,70	100,00	4,79	61,97
17	BDK Banjarmasin	88,65	99,52	99,96	100,00	4,20	60,49
18	BDK Padang	88,12	99,60	99,69	100,00	3,52	58,79
19	Loka Diklat Lampung	87,52	99,45	99,95	100,00	2,63	56,57
20	BDK Aceh	86,97	99,21	99,93	100,00	1,90	54,74



21	BDK Manado	81,57	99,82	92,45	100,00	-3,83	40,41
----	------------	-------	-------	-------	--------	-------	-------

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Nilai Rata-rata Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun 2023 pada Satuan Kerja di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama memperoleh sangat baik atau **92,79**. Terdapat 7 (tujuh) Satuan Kerja pada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang mampu melampaui target perjanjian kinerja tahun 2023 yang sudah ditetapkan yaitu 95,00. Sementara itu masih terdapat dua Satuan Kerja yang memperoleh nilai di bawah 90,00 yaitu BDK Semarang, BDK Papua, BDK Banjarmasin, BDK Padang, LDK Lampung, BDK Aceh dan BDK Manado, hal ini menjadi catatan penting untuk bahan evaluasi dan perbaikan nilai evaluasi kinerja anggaran pada tahun berikutnya.

Faktor utama suksesnya realisasi anggaran dan nilai kinerja anggaran tahun 2023 adalah adanya komitmen bersama terutama komitmen pimpinan yang selalu memantau capaian kinerja dan serapan anggaran, pengembangan dan penguatan aplikasi SIRA (Sistem Informasi Realisasi Anggaran) yang memantau capaian serapan anggaran *real time* per hari untuk satuan kerja pusat, dan pengembangan serta penguatan pelaporan melalui aplikasi **sippalitbangdiklat.kemenag.go.id**. Balitbangdiklat secara rutin mengadakan rapat pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja dan anggaran baik unit kerja pusat maupun daerah. Selain itu Balitbangdiklat secara periodik baik bulanan maupun per-triwulan melaksanakan koordinasi, bimtek dan pemantauan pelaporan capaian kinerja dan anggaran pada unit/satuan kerja baik pusat maupun daerah.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tren Capaian kinerja tahun 2023 sudah baik, walaupun keterbatasan SDM dikarenakan sejak awal Januari 2022 terjadi peralihan SDM Peneliti ke BRIN namun capaian kinerja Balitbangdiklat dalam predikat sangat baik/memuaskan. Dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat secara eksplisit disebutkan bahwa tugas utama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah menghasilkan rumusan bahan kebijakan Kementerian Agama dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur (ASN) berbasis Pelatihan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2023 hasil capaian kinerja **107,99%** dengan predikat **sangat baik**. Adapun kinerja per area adalah kinerja kelitbangan adalah **116,62%**, kinerja kediklatan adalah **108,72%**, kinerja pelayanan publik **112,21%** dan kinerja dukungan manajemen adalah **95,31%**;
2. Penyerapan anggaran tahun 2023 adalah **99,32%** dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran adalah **96,37**, Nilai **EKA** Balitbangdiklat menempati peringkat **Kedua** diantara 11 Unit Eselon I Kementerian Agama. Faktor yang sangat berpengaruh adalah adanya komitmen bersama dari pimpinan organisasi, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan semua Para Pejabat serta pegawai untuk yang secara serius dan rutin memantau pergerakan serapan anggaran setiap bulannya melalui *group Whatsapp*, aplikasi SIPPA Balitbangdiklat dan aplikasi SIRA. Balitbangdiklat melakukan Rapat rutin di level pimpinan untuk memantau dan evaluasi terkait pencapaian kinerja dan anggaran. Selain itu Balitbangdiklat secara periodik baik bulanan maupun per-triwulan melaksanakan koordinasi, bimtek dan pemantauan pelaporan capaian kinerja dan anggaran pada unit/satuan kerja baik pusat maupun daerah.
3. Perkin Balitbangdiklat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra 2020-2024 dimana terdapat penyesuaian IKU, seiring dengan kebijakan Perpres 78 tahun 2021 tentang BRIN. Target kelitbangan terkait *policy paper*, HAKI, dan publikasi hasil penelitian pengembangan tercapai. Balitbangdiklat telah mengembangkan elektronik survey (*e-survey*). Pada sisi *policy paper* telah disusun sesuai target yang mendukung IKU Kementerian Agama. *Policy paper* ini juga merupakan amanat RPJMN 2020-2024 bahwa penelitian yang dilakukan wajib digunakan/ menjadi rumusan kebijakan. Publikasi menjadi penting dan luas dengan hadirnya simlitbang android dan e-perpus Balitbangdiklat *android* yang dapat diakses oleh masyarakat, serta publikasi telah dilakukan baik di media sosial, maupun media elektronik.
4. IKU terkait kediklatan secara keseluruhan tercapai terutama target alumni diklat. Dalam penyelenggaraan diklat dilakukan dengan transformasi pada e-DJJ dan mengembangkan MOOC. Teknologi MOOC terus diperkuat dan dikembangkan untuk menunjang kediklatan. Capaian kompetensi alumni diklat tercapai dengan dukungan manajemen mutu. Pemanfaatan alumni diklat berada dalam area sangat baik dimana hasil kediklatan (pengetahuan dan keterampilan) dapat diterapkan oleh



para alumni di satuan kerjanya. Meskipun demikian perlu adanya koordinasi dengan pimpinan satker dalam perluasan pemanfaatan ini.

5. IKU terkait pelayanan publik secara keseluruhan memperoleh predikat sangat baik untuk semua indikator. Tingkat kepuasan yang dihasilkan sangat baik (capaian lebih dari 100% dari target yang ditetapkan). Hal yang masih perlu peningkatan berada dalam area pelayanan pentashihan yaitu waktu layanan dan jumlah pengunjung. Balitbangdiklat senantiasa komitmen untuk mengembangkan sistem *e-office* agar pelayanan internal dan eksternal semakin mudah dan cepat. Pelayanan museum sudah dikembangkan museum virtual dengan mengakses alamat: <https://bqmi.iheritage.id/> sehingga memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui koleksi museum Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal tanpa harus datang ke lokasi.
6. IKU area dukungan manajemen mempunyai capaian baik terutama nilai SAKIP, dan maturitas SPIP. Dalam area SAKIP, Balitbangdiklat memperoleh penilaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sedangkan area yang masih perlu perbaikan adalah evaluasi kinerja. Area yang masih perlu perbaikan adalah persentase tindak lanjut hasil temuan (TLHP), dari total temuan Rp1.101.915.274,- (*satu milyar seratus satu juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) telah ditindaklanjuti diselesaikan Rp636.687.818,- (*enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah*) atau **57,78%**. Selain itu tahun 2023 Balitbangdiklat mengajukan 5 satker untuk projek Zona Integritas yaitu Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an, BDK Semarang, BDK Palembang, BDK Denpasar dan BDK Ambon, namun belum mendapatkan hasil yang optimal, dikarenakan berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP Tahun 2022 Kementerian Agama mendapat nilai di bawah 3,00 sehingga proses pengajuan satker ZI tidak bisa dilanjutkan penilaian oleh Kemenpan-RB.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2023 ini, adalah:

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Balitbangdiklat telah menyusun regulasi internal SE Balitbangdiklat No.8 Tahun 2020 tentang Reward dan Punishment dalam Capaian Kinerja. Akan tetapi efektifitas regulasi ini masih perlu peningkatan. Oleh karena diperlukan sosialisasi pengukuran, pemahaman dan juga penerapan atas regulasi internal ini. Regulasi ini juga perlu disesuaikan dan disempurnakan disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi yang berkembang;
2. Pada sasaran kelitbang perlu:
 - a. Melakukan monev atas hasil *policy paper* ke *stakeholders* atau pemangku kebijakan;
 - b. Penguatan dokumen rekomendasi kebijakan yang lebih praktis dan implementatif sehingga memudahkan pimpinan dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengambil kebijakan;



- c. Pengembangan dan penguatan data center dan digitalisasi hasil litbang/survey, melalui aplikasi simlitbang dan e-perpustakaan android;
 - d. Penguatan publikasi, diseminasi produk baik nasional maupun internasional;
 - e. Pengembangan dan penguatan implementasi e-Survey;
 - f. Penguatan HAKI.
3. Pada sasaran kediklatan:
 - a. Pemetaan kebutuhan pelatihan berbasis IT (e-Kebutuhan Pelatihan)
 - b. Pembangunan penjaminan mutu kompetensi alumni;
 - c. Diversifikasi kebutuhan pelatihan yang menunjang renstra dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Monev pemanfaatan alumni diklat secara periodik;
 - e. Pembangunan *CU – Corporate University* pada internal Balitbangdiklat dan Kementerian Agama;
 - f. Pembangunan *Talent Pool*;
 - g. Pengembangan kompetensi Widyaiswara, Pengembang Teknologi Pembelajaran dan jabatan fungsional lainnya yang mendukung kinerja kediklatan.
 4. Pada sasaran pelayanan publik:
 - a. Meningkatkan jumlah dan diversifikasi produk museum serta sosialisasi produk museum (kekinian) ke masyarakat;
 - b. Penguatan museum al-Qur'an digital/ virtual;
 - c. Sosialisasi penggunaan al-Qur'an kemenag android;
 - d. Perlunya menyusun naskah akademik jabatan fungsional penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
 - e. *Review* dan memperbaiki mekanisme/prosedur pelayanan publik.
 5. Pada sasaran dukungan manajemen:
 - a. Koordinasi dan kerjasama penanganan TLHP dengan Inspektorat Jenderal;
 - b. Pembangunan sistem pengendalian internal per area Badan Litbang dan Diklat;
 - c. Casecading IKU organisasi ke level pegawai/ individu;
 - d. Penguatan relevansi antara IKU organisasi dan RKA-K/L;
 - e. Pemetaan kebutuhan pelatihan/ Bimtek untuk meningkatkan kompetensi pegawai berbasis IT (e-kebutuhan kompetensi);
 - f. Pembangunan budaya kerja organisasi dan pelibatan semua pegawai dalam Reformasi Birokrasi serta target Reformasi Birokrasi yang akan dicapai.
 - g. Akselerasi budaya inovasi pada satuan kerja yang akan diajukan pembangunan zona integritas.
 - h. Memperkuat koordinasi, bimtek, monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan, pencapaian kinerja dan anggaran di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
 - i. Koordinasi percepatan terbitnya PMA turunan Perpres 12 Tahun 2023 yang mengatur SOTK Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kementerian Agama, sebagai pengganti/perubahan Eselon I Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Lampiran:

Dokumentasi Foto-Foto Kegiatan Tahun 2023



**Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVI
12 Juni 2023**



**The 4th ISLAGE (International Symposium on Religious Literature & Heritage)
2-4 Agustus 2023**



**Pembukaan Orientasi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja di Surabaya
13 September 2023**



**Launching Digital Learning Center & Smart Classroom
28 Maret 2023**



**Upacara Pelepasan Pelatihan Kepemimpinan Nasional
26 Oktober 2023**



**Konferensi Moderasi Beragama Asia Afrika dan Amerika Latin
20 - 22 Desember 2023**